ANALISIS WACANA KRITIS KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19

TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar M.Sos.

HARUN ARROSYID
201764003

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1447 Tahun 2022

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama	:	Harun Arrosyid
NIM	:	201764003
Program Studi	:	Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul	:	Analisis Wacana Kritis Komunikasi Pemerintah Dalam Pengendalian Pandemi Covid-19

Telah disidangkan pada tanggal **12 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Sosial (M.Sos.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 14 Oktober 2022
Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Harun Arrosyid
NIM : 201764003
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Tesis : Analisis Wacana Kritis Komunikasi Pemerintah Dalam Pengendalian Pandemi Covid-19

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		9/10-2022.
2	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Sekretaris/ Penguji		14/10 22
3	Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag. NIP. 19691219 199803 1 001 Pembimbing/ Penguji		14/10 22
4	Dr. Nawawi, M.Hum. NIP. 19710508 199803 1 003 Penguji Utama		14/10/2022
5	Dr. Umi Halwati, M.Ag. NIP. 19840819 201101 2 011 Penguji Utama		14/10 2022

Purwokerto, 14 Oktober 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Nawawi, M.Hum.
NIP. 19710508 199803 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Harun Arrosyid
NIM : 201764003
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Tesis : Analisis Wacana Kritis Komunikasi Pemerintah Dalam Pengendalian Pandemi Covid-19

dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 04 Oktober 2022
Pembimbing

Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
NIP. 19691219 199803 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: "Analisis Wacana Kritis Komunikasi Pemerintah Dalam Pengendalian Pandemi Covid-19" Seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 4 Oktober 2022

Hormat saya,

Harun Arrosyid

ANALISIS WACANA KRITIS KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19

Harun Arrosyid
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, Indonesia
Alamat Korespondensi: 201764003@mhs.uinsaizu.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan kasus Covid-19 seperti anjuran memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengendalikan mobilitas masyarakat dan vaksinasi. Dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut pemerintah perlu menyampaikan dengan komunikasi pemerintah. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak sistematis dan linier diantara sesama pejabat pemerintah sehingga masyarakat belum mempercayai sepenuhnya kinerja Pemerintah dalam upayanya mengatasi pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis komunikasi pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19. Data diambil langsung dari komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan pengendalian Covid-19 yang disampaikan melalui *website* satuan tugas penanganan Covid-19 yaitu *covid19.go.id* yang berisi kebijakan PSBB, PPKM, anjuran memakai masker dan cuci tangan, PCR, dan vaksinasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis wacana kritis Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukan media menitikberatkan pada sisi positif kebijakan yang diambil Pemerintah dalam menetapkan PSBB, PPKM, penggunaan masker dan cuci tangan dengan sabun, kebijakan PCR serta vaksinasi ditengah situasi Pandemi Covid-19 serta menunjukan bahwa pemerintah merupakan pihak yang berkuasa penuh atas semua kebijakan dan masyarakat harus mematuhi semua kebijakan pengendalian Covid-19.

Kata Kunci : Analisis Wacana Kitis, Komunikasi Pemerintah, Covid-19

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF GOVERNMENT COMMUNICATIONS IN COVID-19 PANDEMIC CONTROL

Harun Arrosyid
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri State Islamic University
Purwokerto, Indonesia
Author Correspondence: 201764003@mhs.uinsaizu.ac.id

ABSTRACT

The government has issued various policies to control Covid-19 cases, such as recommendations for wearing masks, washing hands, maintaining distance, controlling community mobility and vaccination. In disseminating the policy, the government needs to convey it through government communication. The communication carried out by the government is not systematic and linear between fellow government officials so that people do not fully trust the Government's performance in its efforts to overcome the Covid-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze government communication in controlling the Covid-19 pandemic. The data was taken directly from government communications in conveying the Covid-19 control policy which was submitted through the website of the Covid-19 task force, namely covid19.go.id which contained the PSBB, PPKM, recommendations for wearing masks and washing hands, PCR, and vaccinations. Analysis of the data used is Norman Fairclough's critical discourse analysis. The results of the study show that the media focuses on the positive side of the policies taken by the Government in setting PSBB, PPKM, the use of masks and washing hands with soap, PCR policies and vaccinations in the midst of the Covid-19 Pandemic situation and shows that the government is the party with full power over all policies and the public. must comply with all Covid-19 control policies.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Government Communication, Covid-19

MOTTO

"Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan : sungguh kita semua ini milik Alloh dan sungguh kepada Nya lah kita kembali"[1]

(QS Al-Baqarah: 155-156)

[1] "Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 155-156,"

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrohmatullohi Wabarokaatuh

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Analisis Wacana Kritis Komunikasi Pemerintah Dalam Pengendalian Pandemi Covid-19". Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan Memperoleh Gelar M.Sos. Selama proses penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Nawawi, M.Hum., Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag. selaku pembimbing tesis yang sudah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tesis ini
5. Para dosen dan staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Kedua orang tua, istri dan anak tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil, serta kakak maupun adik yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'a dalam hari-hari penyusunan tesis ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa program studi pascasarjana khususnya Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang selalu kompak untuk terus berjuang meraih cita-cita.
8. Semua pihak yang membantu penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullohi Wabarokaatuh

Purwokerto, 4 Oktober 2022

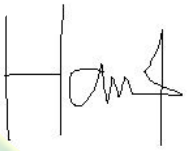

Harun Arrosyid

DAFTAR ISI

Halaman

Cover i
Pengesahan Direktur ii
Pengesahan Tim Pembimbing iii
Nota Dinas Pembimbing iv
Pernyataan Keaslian v
Abstrak (Bahasa Indonesia) vi
Abstrak (Bahasa Inggris) vii
Motto viii
Kata Pengantar ix
Daftar Isi xi
Daftar Bagan xiii
Daftar Tabel xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Sistematika Penulisan 5

BAB II LANDASAN TEORI 7
A. Komunikasi Pemerintah 7
1. Pengertian 7
2. Tujuan Komunikasi Pemerintah 10
3. Fungsi Komunikasi Pemerintah 10
4. Unsur Komunikasi Pemerintah 12
5. Jenis Komunikasi Pemerintah 14
6. Bentuk Komunikasi Pemerintah 14
7. Media Komunikasi Pemerintah 18
B. Pengendalian Pandemi Covid-19 19
1. Pembatasan Sosial Berskala Besar 21
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 22
3. Pakai masker dan Cuci Tangan 23
4. Ketentuan Reverse Transcription Polymerase Chain ReactionTes) 24
5. Vaksinasi Covid-19 25
C. Analisis Wacana 28
D. Analisis Wacana Kritis 31
1. Pengertian 31
2. Prinsip-prinsip Analisis Wacana Kritis 33
3. Ciri-Ciri Analisis Wacana Kritis 33
4. Model-Model Analisis Wacana Kritis 35
E. Komunikasi Pemerintah dalam Perspektif Wacana Kritis 39
F. Hasil Penelitian Yang Relevan 41

G. Kerangka Berpikir 46

BAB III METODE PENELITIAN 47
A. Pendekatan Penelitian 47
B. Tempat Dan Waktu Penelitian 47
C. Data dan Sumber Data 47
D. Teknik Pengumpulan Data 48
E. Teknik Analisis Data 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
A. Deskripsi laman www.covid19.go.id 51
B. Pebahasan 55

BAB V KESIMPULAN 93
A. Kesimpulan 93
B. Implikasi Penelitian 94
C. Keterbatasan Penelitian 94
D. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 95

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1 Model analisis wacana kritis Norman Fairclough 38

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir 46

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Struktur teks Norman Faircloug	38
Tabel 4.1	Data Temuan Komunikasi Pemerintah Dalam Menetapkan Kebijakan Pegendalian Covid-19	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Desease 19 (Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) dan dinyatakan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020[1]. Sedangkan pandemi Covid-19 di Indonesia sudah terjadi sejak pertama kali pemerintah mengumumkan adanya kasus Covid-19 pertama pada bulan Maret 2020 lalu[2]. Situasi pandemi terus berlangsung hingga munculnya varian-varian Covid-19 seperti Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Delta (B.1.617.2) dan Omicron. Puncak pertama terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia pada bulan Januari 2021 ditandai dengan jumlah kasus mingguan Covid-19 mencapai 89.902 kasus. Dilanjut pada bulan Juni 2021, terjadi lonjakan lagi kasus pandemi Covid-19 gelombang kedua dengan jumlah kasus minggun mencapai 125.393 kasus[3].

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan peningkatan penyebaran kasus Covid-19 seperti anjuran memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengendalikan mobilitas masyarakat dan vaksinasi. Dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah perlu menyampaikan dengan komunikasi pemerintah yang terencana, jelas dan transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tidak menyebabkan kepanikan.

Komunikasi pemerintah merupakan komunikasi antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintah. Karena itu komunikasi pemerintah tidak lepas dari kontek komunikasi organisasi dan merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Pesan yang

[1] Mona N., "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2, no. 2 (2020).
[2] Berty T. T. S., "Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia Jadi Sorotan Dunia.," 2020.
[3] Satuan Tugas Penanganan Covid-19 RI, "Data Sebaran Covid-19," 2021, https://covid19.go.id/.

disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide, instruksi, atau perasaan-perasaan (*feelings*)[4]. Komunikasi pemerintah yang efektif dapat terbangun dengan adanya strategi komunikasi yang tepat. Keberhasilan strategi komunikasi tersebut didukung oleh unsur komunikasi mulai dari pemberi pesan (komunikator), pesan, saluran (media), penerima pesan (komunikan) dan efek untuk mencapai tujuan komunikasi[5].

Komunikasi Pemerintah memiliki peran penting dalam menyukseskan berbagai program Pemerintah di segala bidang. Sesuai dengan pendapat Maria Jose Canel and Karen Sanders, Komunikasi Pemerintah pada dasarnya adalah segala sesuatu tentang praktik komunikasi yang berlangsung di ruang lingkup pemerintah, khususnya eksekutif[6].

Dalam konteks penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 oleh pemerintah, komunikasi yang diselenggarakan Pemerintah akan menentukan efektifitas keberhasilan dalam penanganan Covid-19 dan sekaligus akan menumbuhkan, mempertahankan, dan memperkuat kepercayaan *(trust)* masyarakat kepada Pemerintah. Oleh karenanya, Komunikasi Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 perlu dikelola, dibangun, dilaksanakan, dan dievaluasi secara komprehensif dan berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai faktor yang melingkupinya[7].

Komunikasi pemerintah yang efektif dapat membangun pemahaman terhadap masyarakat mengenai risiko yang sedang dihadapi dan sebagai petunjuk dalam berperilaku pada masa pandemi. Keberhasilan program pengendalian Covid-19 dipengaruhi oleh adanya sikap penghargaan atas

---

[4] Malone Samuel, *Mind Skill For Managers* (England: Jower Publishing Limited, 1997).
[5] Cangara H., *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
[6] M. J. Sanders, K., & Canel, "Mind the Gap: Local Government Communication Strategies and Spanish Citizens' Perceptions of Their Cities," *Public Relations Review* 41, no. 5 (2015): 777–84.
[7] Putra & Handoko, "Komunikasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah: Kasus Dinamika Pelaksanaan Local Lockdown Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19," *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 1–15.

keterbukaan informasi sehingga menciptakan partisipasi publik[8]. Selain itu, juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan kemampuan pemerintah untuk menangani pandemi, serta mencegah kepanikan masyarakat.

Pemerintah telah melakukan proses komunikasi pemerintah dengan maksimal, namun masyarakat menilai komunikasi pemerintah tidak konsisten dan tidak efektif, semua usaha tersebut tidak cukup maksimal untuk dipandang sebagai langkah strategis mengatasi pandemi[9]. Sehingga berdampak kepada kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan (prokes) yang belum optimal[10]. Ketidakpatuhan masyarakat tersebut juga difragmentasikan melalui keengganan sebagian masyarakat untuk melakukan tracking kesehatan karena tidak mempercayai wabah Covid-19 tersebut benar-benar ada.

Ketidakonsistenan informasi yang disampaikan pemerintah dapat dilihat dari pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyampaikan melalui keterangan tertulis nya yang dimuat pada hari Rabu, 17 November 2021 mengatakan bahwa selama libur Natal dan Tahun Baru, seluruh wilayah Indonesia akan diberlakukan secara serentak peraturan PPKM Level 3. Dengan informasi tersebut, masyarakat sudah bersiap menjelang penerapan PPKM level 3 Nasional[11]. Banyak masyarakat yang membatalkan rencana mudik, berlibur, hajatan, resepsi pernikahan dan lain-lain. Namun, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali mengeluarkan pernyataan bahwa Pemerintah

[8] Sulistyowati F, "Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan COVID-19 Pada Majalah TEMPO Edisi Maret-Juli 2020," *Urnal Riset Komunikasi* 4, no. 2 (2021): 198–214.
[9] Sulistyowati F, "Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan COVID-19 Pada Majalah TEMPO Edisi Maret-Juli 2020," *Urnal Riset Komunikasi* 4, no. 2 (2021): 198–214.
[10] Badan Pusat Statistik, "Survei Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19," 2021, https://covid-19.bps.go.id/.
[11] Novrizaldi, "Perketat Libur Nataru, Pemerintah Akan Terapkan Kebijakan PPKM Level 3 Di Seluruh Indonesia. Kemenko PKM," 2021.

memutuskan untuk tidak menerapkan PPKM level 3 pada periode libur Natal dan Tahun Baru karena adanya perubahan Imendagri dan surat edaran[12]. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan klarifikasi bahwa pernyataaan Muhadjir bukanlah keputusan resmi pemerinta[13].

Perbedaan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemerintah dalam pengendalian Covid-19 juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan bukan lagi PSBB transisi mulai 14–25 September 2020[14.] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beralasan bahwa keputusan tersebut atas dasar pertimbangan risiko kesehatan dan kapasitas fasilitas kesehatan. Pengambilan keputusan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang masih memberlakukan PSBB Transisi dan dilakukan tanpa koordinasi[15]. Ketidakseragaman informasi yang disampaikan pejabat pemerintah tersebut menimbulkan kebingungan masyarakat dan berisiko menimbulkan ketidaktertarikan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah karena masyarakat menilai Pemerintah labil dan tidak konsisten dalam memutuskan kebijakan selama pandemi Covid-19.

Hal tersebut, mengindikasikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung penanganan pandemi belum optimal, pemerintah dianggap belum berhasil membangun komunikasi tentang penanganan Covid-19, komunikasi pemerintah dianggap tidak sistematis dan linier diantara sesama pejabat pemerintah serta masyarakat belum mempercayai sepenuhnya kinerja Pemerintah dalam upayanya mengatasi

---

[12] Nugraheny D.E., "PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri Dan SE," 2021.

[13] Nurita D., "Kebijakan PPKM Level 3 Batal Diterapkan," 2021, https://nasional.tempo.co/read/1537104/kebijakan-ppkm-level-3-batal-diterapkan-pemerintah-dinilai-labil.

[14] BBC News, "Covid-19: Jelang Pemberlakuan Kembali PSBB , Kasus Harian Di Jakarta Mencapai 1.274," 2021, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52922566.

[15] JPNN, "Gubernur Anies Baru Berkoordinasi Dengan Satgas COVID-19 Setelah Umumkan Rencana PSBB," 2020, https://www.jpnn.com/news/gubernur-anies-baru-berkoordinasi-dengan-satgas-covid-19-setelah-umumkan-rencana-psbb.

pandemi Covid-19[16]. Sehingga, dalam penelitian ini akan dibahas tentang analisa wacana kritis komunikasi pemerintah pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis komunikasi pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini anata lain:

1. Pada kajian teoritik, penelitian ini adalah bentuk dedikasi pemikiran guna menambah keberagaman paradigma keilmuan komunikasi khusunya komunikasi pemerintah.
2. Secara praktis, penelitian ini berimplikasi kepada:
   a. Akademisi, diharapkan dengan lahirnya kajian ini dapat menambah paradigma baru dan sekaligus memperkuat akar pengembangan keilmuan komunikasi.
   b. Praktisi, diharapkan penelitian ini mampu memberi referensi atas relevansi komunikasi pemerintah sebagai salah satu bentuk komunikasi yang banyak dilakukan dimasa pandemi. Selain itu manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan masyarakat dapat menilai dan ikut menganalisis setiap komunikasi pemerintah yang dilakukan.
   c. Lembaga, penelitian ini diharapkan berdampak pada sistem komunikasi pemerintah. Kajian komunikasi pemerintah diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan komunikasi agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat,

[16] Fakhururoji M. et al., "Strategi Komunikasi Publik Penanganan COVID-19 Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Komunikasi Pemerintah Dan Agama," *LP2M Sunan Gunung Djati.*, 2020.

dengan harapan terjalin hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, penelitian ini berisi lima BAB. Sistematika penulisan ini bertujuan memberi gambaran secara umum terkait dengan kerangka penelitian. Dengan demikian, penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan dengan menguraikan latar belakang masalah,rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang terdiri dari komunikasi, covid-19 dan analisis kritis. Selain itu pada BAB ini juga dipaparkan tentang penelitian-penelitian yang relevan untuk meminimalkan kesamaan penelitian dan kerangka berpikir.

Bab Ketiga berisi metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi wilayah penelitian dan sub bab pembahasan.

Bab Kelima berisi kesimpulan, implikasi dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Komunikasi Pemerintah

1. Pengertian

Komunikasi secara etimologi berasal dari bahasa latin *communis*, yang memiliki makna sama (*common*). Kata *communis* berkembang menjadi bentuk kata kerja *communicare*, yang memiliki makna menyebarkan informasi kepada orang lain guna mendapatkan pengertian informasi yang sama[1].

Secara "terminologi" ada banyak ahi yang mencoba mendefinisikan diantaranya Hovland, Janis dan Kelley seperti yang dikemukakan oleh Forsdale bahwa komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain[2]. Komunikasi juga diterjemahkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu suatu kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan tersbut dapat dipahami dengan sama[3].

Everest M. Rogers berpendapat bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian sebuah ide gagasan dari satu sumber kepada pihak lain dengan tujuan untuk mengubah perilaku. Sedangkan Anwar Arifin juga menyampaikan gagasannya bahwa komunikasi merupakan upaya yang dilakukan secara bersama-sama dengan membentuk perhubungan[4]. Komunikasi sering digunakan sebagai proses, pesan dan pengarah atau secara khusus menjadi pesan pasien dalam psikoterapi.

Hakikat komunikasi adalah proses ekspresi antar manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pikiran atau

[1] Wursanto, *Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi* (Jogjakarta: CV. Andi Offset, 2005).
[2] Muhamad Arni, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014).
[3] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2021).
[4] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).

perasaan yang dipunyai. Tentu saja, ekspresi pikiran dan perasaan itu memakai dan memanfaatkan bahasa sebagai medium komunikasinya. Dalam bahasa komunikasi, setiap orang atau sesuatu yang menyampaikan sesyatu tersebut sebagai komunikator. Sesuatu yang disampaikan atau diekspresikan adalah pesan (*message*). Seseorang atau sesuatu yang menerima pesan adalah (*communicate*)[5].

Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku sedangkan pemerintahan merupakan semua aktifitas, proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenang untuk mencapai tujuan negara. Secara etimologis kata Pemerintah berasal dari kata "pemerintah", kata Pemerintah sendiri berasal dari kata "perintah" yang berarti menyuruh melakukan sesuatu pekerjaan. Namun tinjauan asal kata "pemerintah" sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa inggris "*government*" yang diterjemahkan sebagai "pemerintah" dan "pemerintah" dalam banyak tulisan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu kementrian yang diberi tanggungjawab memelihara perdamaian dan keamanan negara.

Pemerintah dalam arti sempit dapat dipandang sebagai aktivitas memerintah yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif saja) dan jajarannya guna mencapai tujuan negara. Sedangkan Pemerintah dalam arti luas dapat pula dipandang sebagai aktivitas pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam mencapai tujuan negara. Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda perlu juga dipahami pengertian eksekutif. Karena belakangan ini istilah eksekutif berkembang dalam konotasi politik dan eksekutif dalam konotasi administratif. Eksekutif dalam konotasi politik adalah salah satu cabang Pemerintah dalam arti luas, yang sering juga disebut eksekutif dalam arti sempit. Namun eksekutif dalam pengertian administratif adalah

[5] Muhammad Mufid, *Etika Dan Filsafat Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2013).

orang-orang yangn bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan orang lain dan menjadi perantara mengalirnya perintah-perintah dan kebijakan-kebijakan dari para administrator kepada para pegawai[6].

Maka yang dimaksud dengan komunikasi pemerintah sendiri merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh organisasi pemerintah, baik antar individu maupun lembaga intansi lainnya dalam konteks aktivitas pemerintah. Dalam bukunya, Yusuf mengatakan bahwa komunikasi pemerintah merupakan komunikasi antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi pemerintah tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi dan bagian dari komunikasi organisasi[7].

Komunikasi pemerintah dibagi menjadi dua tipe saluran komunikasi, yaitu memudahkan komunikasi intern dan media untuk berkomunikasi secara eksternal.

a. Memudahkan komunikasi intern, dalam proses birokrasi internal ini memiliki tiga aspek yakni informasi sebagai dasar untuk membuat keputusan, putusan dan dasar alasannya harus disebarkan agar anggotaanggota organisasi itu melaksanakannya dan media untuk pembicaraan organisasi, percakapan sehari-hari yang biasa dalam menjalankan pekerjaan, dan pembicaraan yang dilakukan oleh anggota-anggota dalam melaksanakan tugas menciptakan keanggotaan yang bermakna dalam tatanan sosial yang sedang berlangsung.
b. Media untuk berkomunikasi secara eksternal. Dalam dinas pemerintah misalnya, media yang mencakup saluran untuk berkomunikasi kepada warga masyrakat pada umumnya, klien kepentingan khusus, legislatif, dan instansi pemerintah yang lain[8].

---

[6] Erliana Hasan, *Komunikasi Pemerintahan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).
[7] Yusuf Zainal Abidin, *Komunikasi Pemerintahan : Filosofi, Konsep Dan Aplikasi,* (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
[8] Yusuf Zainal Abidin.

2. Tujuan Komunikasi Pemerintah

   Tujuan dilakukannya komunikasi pemerintah antara lain:

   a. Menyampaikan informasi atau gagasan sehingga ada kesesuaian paham di antara kedua belah pihak. Komunikasi tidak berhasil apabila informasi yang dikomunikasikan oleh pihak pertama tidak dapat ditangkap dan dipahami oleh pihak kedua atau paham yang diperoleh pihak kedua tidak sesuai dengan paham yang disampaikan kepadanya. Dalam hubungan kerja biasanya informasi dikomunikasikan untuk digunakan atau diterapkan dalam bidang kerja pihak kedua.
   b. Mengirim informasi publik (*public information*) oleh administrator/aparatur kepada masyarakat dan sektor swasta (*private sector*) atau sektor bisnis (*business sector*) dan mengakomodasi opini publik (*public opinion*) dari masyarakat dan sektor bisnis
   c. Memberi tugas supaya diselesaikan dengan efektif dan efisien.
   d. Penyampaian informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang berlaku
   e. Memberitahukan tujuan pemerintah sebagai sesuatu yang harus dicapai
   f. Mampu menggerakkan khalayak untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan pemerintah[9].

3. Fungsi Komunikasi Pemerintah

   Hal ini juga yang mendasari betapa pentingnya komunikasi dalam pemerintah karena memiliki fungsi yang sesuai dengan tujuan pemerintah. Sendaja menyatakan fungsi komunikasi dalam organisasi pemerintah sebagai berikut[10].

   a. Fungsi Informatif

      Pemerintah dipandang sebagai sistem pemrosesan infromasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam pemerintah berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi dapat diperoleh dari pimpinan, wakil dan bawahan sehingga

[9] Gondokusumo A.A, *Komunikasi Penugasan* (Jakarta: Gunung Agung, 1980).
[10] Sasa Djuarsa Sendjaja, *Teori-Teori Komunikasi, Cetakan Ke-1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994).

dengan adanya informasi tersebut memungkinkan setiap orang dalam pemerintah menjalankan tugasnya secara pasti dan lebih baik.

b. Fungsi Regulatif

Fungsi ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam pemerintah. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu: Berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan; dan berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan sehingga dengan komunikasi dapat mencegah ketidakpastian.

c. Fungsi Persuasif

Dalam mengatur suatu pemerintah, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kenyatan ini menyebabkan banyak pimpinan yang lebih menyukai untuk mempersuasif bawahannya daripada memberi perintah. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang dilakukan atas perintah pimpinan yang sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya.

d. Fungsi Integratif

Organisasi pemerintah akan berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan stafnya dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut yaitu

1) Saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam organisasi (buletin, newsletter) dan laporan kemajuan organisasi;
2) Saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antarpribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olehraga, ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas akan menumbuhkan

keinginan untuk berpartisipasi lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Dengan adanya saluran komunikasi seluruh anggota organisasi dapat mengerjakan tugas dengan tepat, selain itu pula akan menciptakan hubungan yang harmonis dalam organisasi.

4. Unsur Komunikasi Pemerintah

   Adapun unsur proses terjadinya komunikasi pemerintah menurut Ilaihi[11]adalah:

   a. Komunikator (*Sender*) adalah pihak yang memiliki tugas untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada kelompok atau individu. Dalam proses komunikasi pemerintah, komunikator berperan penting karena mengerti atau tidaknya lawan bicara tergantung cara penyampaian komunikator. Komunikator berfungsi sebagai encoder, yakni sebagai orang yang memformulasikan pesan yang kemudian menyampaikan kepada orang lain, orang yang menerima pesan ini adalah komunikan yang berfungsi sebagai decoder, yakni menerjemahkan lambanglambang pesan konteks pengertian sendiri. Persamaan makna dalam proses komunikasi sangat bergantung pada komunikator, maka dari itu terdapat syarat-syarat yang diperlukan oleh komunikator, diantaranya memiliki kredibilitas yang tinggi bagi komunikannya, kemampuan berkomunikasi, mempunyai pengetahuan yang luas, sikap yang baik, memiliki daya tarik dalam arti memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sikap atau perubahan pengetahuan pada diri komunikan[12].

   b. Pesan (*Message*) adalah lambang atau simbol yang memiliki arti tertentu yang dipublikasikan oleh komunikator. Pesan ini dapat berupa verbal maupun noverbal. Pesan verbal dapat secara tertulis seperti surat, memo, surat edaran, sedangkan pesan secara lisan dapat berupa percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, media online, dan

[11] Ilaihi, *Komunikasi Dakwah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).
[12] Effendi, *Kepemimpinan Dan Komunikasi* (Jogjakarta: Al-Amin Press, 2014).

sebagainya. Pesan non verbal dapat berupa isyarat, gerakan badan dan ekspresi muka dan nada suara.

Ada beberapa bentuk pesan, diantaranya:

1) Informatif, yakni memberikan keterangan-keterangan dan kemudian komunikan dapat mengambil kesimpulan sendiri.
2) Persuasif, yakni dengan bujukan untuk membangkitkan pengertian dan kesadaran seseorang bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan rupa pendapat atau sikap sehingga ada perubahan, namun perubahan ini adalah kehendak sendiri.
3) Koersif, yakni menggunakan sanksi-sanksi. Bentuknya terkenal dengan agitasi, yakni dengan penekanan-penekanan yang menimbulkan tekanan batin diantara sesamanya dan pada kalangan publik

c. Perantara (Media) adalah tempat yang digunakan untuk penyampaian pesan oleh komunikator. Media yaitu sarana atau alat yang digunakan oleh kominkator untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan atau sarana yang digunakan untuk memberikan feedback dari komunikan kepada komunikator. Media sendiri merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang artinya perantara, penyampai, atau penyalur.
d. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai atau Negara. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam istilah seperti khalayak, sasaran, komunikan atau dalam bahasa inggris disebut *audience* atau *receiver*. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber. Tidak ada penerima jika tidak ada sumber. Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima oleh

penerima, akan menimbukan berbagai macam masalah yang sering kali memuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan, atau saluran[13].

e. Umpan balik (*Feedback*) adalah respon yang muncul dari komunikan setelah mendapatkan informasi dari komunikator.

5. Jenis Komunikasi Pemerintah

a. Komunikasi Tertulis

Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang disampaikan secara tertulis. Keuntungan komunkasi ini antara lain adalah bahwa komunikasi itu telah dipersiapkan terlebih dahulu secara baik. Contoh komunikasi tertulis pemerintah yaitu surat perintah, surat edaran, surat keputusan.

b. Komunikasi Lisan

Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan. Komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung berhadapan atau tatap muka dan dapat pula menggunakan telepon, atau media online.

c. Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi menggunakan mimik, pantonim, dan bahasa isyarat.

d. Komunikasi Satu Arah

Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang bersifat koersif dapat berbentuk perintah, intruksi, dan bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi. Biasanya komunikasi ini dilakukan dari pemerintah kepada institusi, atau masyarakat.

e. Komunikasi Dua Arah

Komunikasi dua arah lebih bersifat informatif, persuasif dan memerluka hasil (*feed back*) yang dilakukan pemerintah kepada pihak ke dua.

6. Bentuk Komunikasi Pemerintah

Susanto berpendapat bahwa komunikasi dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu: komunikasi intrapersonal, antarpersonal, kelompok, organisasi dan

[13] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

komunikasi massa. Komunikasi intrapersonal diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang terjadi pada diri sendiri, biasanya membahas tentang proses pemahaman, ingatan dan interpretasi terhadap simbol yang ditangkap melalui panca indera[14].

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpersonal adalah proses yang dilakukan untuk menciptakan dan mengelola hubungan, serta melaksanakan tanggungjawab dalam menciptakan makna. Contoh komunikasi antarpribadi adalah percakapan tatap muka, percakapan melalui media seperti telepon, zoomatau tang lainnya, dan surat menyurat pribadi[15].

Richard L Weaver berpendapat bahwa karakteristik komunikasi antarpribadi diantaranya merupakan komunikasi yang dilakukan melibatkan paling sedikit dua orang, adanya *feedback*, tidak harus tatap muka, tidak harus bertujuan, menghasilkan pengaruh atau *effec*[16]

Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok kecil dalam komunikasi kelompok harus terdiri dari minimal tiga orang. Komunikasi kelompok berkisar kepada pola atau bentuk interaksi, dinamika, efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi, dan pengambilan keputusan[17]

Komunikasi organisasi diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi organisasi ini melibatkan komunikasi formal, informal, nterpersonal maupun kelompok. Pembahasan dalam komunikasi organisasi difokuskan pada struktur dan fungsi organisasi, dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi[18]. Komunikasi massa dilakukan

[14] Susanto A.S., *Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek I* (Jakarta: Bina Cipta, 2010).
[15] Susanto A.S.
[16] Ganiem LM & Budyatna M, *Teori Komunikasi Antar Pribadi* (Jakarta: Kencana, 2011).
[17] Susanto A.S., *Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek I*.
[18] Romli K, *Komunikasi Organisasi Lengkap* (Jakarta: Grasindo, 2011).

dengan menggunakan media massa. Proses komunikasi massa melibatkan aspek komunikasi intrapersonal, interpersonal, dan kelompok[19].

Menurut Abidin komunikasi yang ada didalam komunikasi pemerintah berupa komunikasi internal dan eksternal[20].

a. Komunikasi Internal

Komunikasi internal mengatakan bahwa komunikasi internal merupakan proses penyampaian pesan yang berlangsung di dalam organisasi, komunikasi dapat berlangsung antara pimpinan dengan pimpinan, pimpinan dengan bawahan, dan bawahan dengan bawahan[21]. Komunikasi internal dalam dimensi komunikasi organisasi adalah proses komunikasi yang terjadi antara anggota dalam organisasi, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi. Terdapat tiga dimensi dalam komunikasi internal, yaitu sebagai berikut:

1) Komunikasi Vertikal, Menurut Abidin komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari atas ke bawah (*down ward communication*) dan komuniksi dari bawah ke atas (*upward communication*) jadi dapat dikatakan sebagai komunikasi timbal balik (*two way traffic communication*). Komunikasi ke atas berarti bawahan menjalin komunikasi dengan atasan, komunikasi ini terjadi dari hierarki wewenang rendah ke hierarki wewenang yang lebih tinggi. Sebaliknya komunikasi ke bawahan adalah dari wewenang yang lebih tinggi ke wewenang yang lebih rendah. Dalam komunikasi vertikal dapat dipahami bahwa komunikan dan komunikator dalam komunikasi vertikal dapat dipegang oleh atasan dan bawahan tergantung pada kepentingan masing-masing pihak. Komunikasi dari atas ke bawah, yaitu pemerintah atau pimpinan sebagai komunikator dan bawahan sebagai komunikan yang bertujuan

---

[19] Baran S.J., *Pengantar Komunikasi Massa: Literasi Media Dan Budaya* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011).

[20] Yusuf Zainal Abidin, *Komunikasi Pemerintahan : Filosofi, Konsep Dan Aplikasi,*.

[21] Nurani, "Pengaruh Komunikasi Internal Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan KErja Karyawan Bagian Pulp Machine Pada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang Riau," *Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru*, 2014.

untuk memberikan wewenang, perintah, instruksi, pengarahan atau tugas kepada bawahan. Sebaliknya komunikasi vertikal dari bawah ke atas yang bertindak sebagai komunikator yaitu bawahan, sedangkan atasan bertindak sebagai komunikan, dengan maksud memberikan memberikan keterangan kepada atasan serta saluran penyampaian, perasaan, atau pikiran dari bawahan yang dapat berupa laporan, ususlan, saran, keluhan dan pendapat[22].

2) Komunikasi Horizontal, Menurut I.G. Wursanto komunikasi horizontal memiliki peran yang penting dalam mengkoordinasikan kegiatan, membantu pelaksanaan tugas pekerjaan. Komunikasi horizontal dilakukan oleh antar anggota staff yang bersifat pemberian informasi antar pimpinan satu unit yang berkaitan pelaksanaan kebijakan pimpinan. Komunikasi horizontal dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi horizontal secara langsung dapat dilakukan dengan cara rapat pimpinan, rapat dinas, dan rapat kerja. Sedangkan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara lisan melalui telfon dan tertulis baik menggunakan nota, memo dan surat kabar. Dalam komunikasi horizontal dapat berupa rapat koordinasi, penyampaian informasi, dan surat tembusan[23].

3) Komunikasi Diagonal, Menurut I.G. Wursanto mengatakan bahwa komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlangsung antar pegawai pada tingkat jabatan yang berbeda pada tugas atau fungsi dan tidak memiliki wewenang langsung terhadap pihak manapun[24].

b. Komunikasi Eksternal

Menurut Gutama komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung dengan organisasi lain, atau dengan lingkungannya[25].

---

[22] Yusuf Zainal Abidin, *Komunikasi Pemerintahan : Filosofi, Konsep Dan Aplikasi,*.
[23] Yusuf Zainal Abidin.
[24] Yusuf Zainal Abidin.
[25] Gutama T.A., "Peran Komunikasi Dalam Organisasi.," *Jurnal Sosiologi Dilema* 25, no. 2 (2010): 107–113.

Komunikasi eksternal banyak digunakan oleh instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang memiliki ruang lingkup komunikasi yang sangat luas. Kemudian Reardon komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan melalui penyampaian sebuah informasi, diskusi dan kerjasama yang didalamnya terdapat pembicaraan dengan menggunakan pesan yang mudah untuk dimengerti[26].

Komunikasi eksternal berhubungan dengan penyampaian pesan seperti kebijakan, peraturan perundang-undangan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sehingga menghasilkan timbal balik yaitu adanya berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah dan peraturan pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat dan institusi swasta kepada pemerintah. Pada hakikatnya komunikasi eksternal yaitu penyebaran informasi oleh pemerintah kepada publlik (*Public Information*) dan informasi yang diterima oleh Pemerintah dari publik (*Public Opinion*) sehingga menunjukan adanya komunikasi antara Pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.

7. Media Komunikasi Pemerintah

Dalam konteks komunikasi pemerintah pembuat keputusan kebijakan publik harus selektif memilih informasi dan menyalurkan informasi secara berkualitas kepada orang di dalam dan di luar organisasi yang berarti bahwa informasi yang disampaikan oleh Pemerintah melalui saluran komunikasi pemerintah dapat sampai ke masyarakat. Saluran Informasi dalam konteks komunikasi pemerintah dapat melalui saluran formal atau direncanakan seperti buku pedoman, buku panduan, laporan-laporan atau komunikasi tulisan dan saluran informal atau tidak direncanakan seperti tatap muka, panggilan telefon atau komunikasi lisan[27]. Menurut I.G. Wursanto bentuk saluran/media komunikasi dikelompokkan menjadi dua[28], yaitu sebagai berikut:

---

[26] Arie Purnomo, "Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Organisasi Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Noken* 3, no. 2 (2018): 11–26.
[27] Yusuf Zainal Abidin, *Komunikasi Pemerintahan : Filosofi, Konsep Dan Aplikasi*,.
[28] Yusuf Zainal Abidin.

a. Media Komunikasi Eksternal, yaitu sebagai berikut :
   1) Media cetak, seperti majalah, surat kabar, dan pamplet (semua barang cetak)
   2) Media Audio-visual, seperti televisi, film, dan video (media yang dapat dilihat dan didengar)
   3) Media Visual, seperti pameran, lukisan, dan foto (media yang dapat dilihat)
   4) Media auditif, seperti radio, telepon, dan tape recorder (media yang dapat didengar) Namun, dari beberapa media yang disebutkan diatas jenis media komunikasi eksternal yang sering atau umum digunakan hingga saat ini adalah pers, radio, pameran, film dan televisi

b. Media Komunikasi Internal

   Saluran media komunikasi internal terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:
   1) Saluran media komunikasi internal tertulis;
      a) Saluran komunikasi ke bawah tertulis; Papan pengumuman, Memo atau nota, Susunan anggaran, Laporan tahunan, Uraian tugas, Buku panduan.
      b) Saluran komunikasi ke atas tertulis; Menyediakan kotak saran, Mengadakan suggestion plan (usulan perencanaan), Grievance procedure (prosedur pengaduan).
      c) Saluran media komunikasi horizontal tertulis; Nota dalam antar bagian atau memo, Mekanisme susunan anggaran
   2) Saluran media komunikasi internal lisan; Wawancara, Kunjungan dan konferensi, Rapat kerja laporan dan Pertemuan.

B. Pengendalian Pandemi Covid-19

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARSCoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid 19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru- paru yang berat,

hingga kematian. SARS- CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui[29]. Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan[30].

Virus Covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya karena proses penularannya begitu cepat antar manusia[31]. Wabah Covid-19 mudah menulari kepada siapapun ketika terjadi proses bersentuhan antar manusia atau bisa jadi penularan melalui droplet. Sejak wabah Covid-19 melanda dunia, banyak terjadi kesimpangsiuran informasi bahkan tersebarinformasi bohongatau hoax[32]. Tidak sedikit dari berita tersebut dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan[33].

Sejak Covid-19 muncul dari Wuhan dan menyebar ke seluruh dunia, data mencatat total kasus covid-19 di dunia yang terkonfirmasi pada tamggal 11 Juli 2022 sebanyak kuranglebih 555juta kasus sedangkaa di Indonesia kasus terkonfirmasi covid 19 6.112.986 kasus. Di masa pandemi Covid-19 saat ini dibutuhkan peran pemerintah dalam menangani kasus penyebaran virus Covid-19. Salah satu yang menjadi tolok ukur pemerintah dalam menangani kasus tersebut adalah melalui komunikasi publik[34].

Program pengendalian pandemi Covid 19 yang ditetapkan pemerintah antara lain:

---

[29] Diah Handayani et al, "Corona Virus Disease 2019," *Jurnal Respirologi Indonesia* 40, no. 2 (2020): 119–29.
[30] Kemenkes, "Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (n.D.)," 2020.
[31] Setyawati N., "Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19," *Jurnal Education And Development* 8, no. 2 (2020): 135–135.
[32] Noor M.U., "Penilaian Kualitas Informasi Sebagai Bentuk Sikap Tabayyun Ketika Menerima Informasi Di Sosial Media Dan Internet," *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi* 2, no. 1 (2018).
[33] Ahmad Mahadi, "Praktik Hegemoni Dalam Novel Orang-Orang Proyek Karya Ahmad Tohari (Kajian Hegemoni Gramsci)," *BAPALA* 7, no. 1 (2020).
[34] Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *IPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM* 6 (2017).

1. PSBB

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan[35].

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dapat segera diatasi. Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau iingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar[36].

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-I9).

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. Pembatasan kegiatan keagamaan;
c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;

---

[35] Kemenkes R. I., "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *Kementerian Kesehatan RI* 28 (2020): 157–63.

[36] Kemenkes R. I.

d. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
e. Pembatasan moda transportasi;
f. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Peliburan sekolah dan tempat kerja dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya[37].

2. PPKM

Setelah beberapa bulan diterapkannya PSBB, namun sebagian menunjukkan kurang efektifnya pelaksanaan PSBB yang mana pemerintah mengubah kebijakan dengan mengganti istilah menjadi PPKM yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jenis PPKM yang diterapkan pertama kali adalah PPKM mikro. Pada pelaksanaan PPKM tersebut terjadi penyekatan pada seluruh wilayah baik zona merah, orange, dan kuning. PPKM mikro tidak memperbolehkan masyarakat untuk mengadakan sebuah hajatan atau acara tertentu. Selain itu ciberlakukannya kebijakan work from home (WFH) bagi pekerja kantor atau lainnya yang mana hanya 25% pegawai yang diperbolehkan untuk melakukan pekerjaanya di kantor.

Pada tahap berikunya PPKM mikro diganti dengan istilah PPKM darurat, dimana pada PPKM ini diterapkan lebih kepada pembatasan kegiatan dan sejumlah sektor. Untuk selanjutnya yaitu PPKM berlevel dimana terdiri atas 4 tingkatan level untuk daerah-daerah tertentu yang dinilai sudah terpapar virus Covid19. Badan satgas kabupaten atau kota menerahkan hasil tingkat tingginya kasus kematian akibat Covid19 yang selanjutnya akan di tetapkan daaerah tersebut akan diterapkan PPKM level berapakah. Harris Yonatan Parmahan Sibuea selaku pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI mengatakan bahwa PPKM diberlakukan pada

[37] Kemenkes R. I.

daerah yang menunjukkan angka kematian covid paling tinggi yaitu daerah Jawa dan Bali. PPKM dilakukan secara berlevel dan berkelanjutan untuk menekan rantai penyebaran virus corona[38]

3. Pakai Masker dan Cuci Tangan

Berdasar rekomendasi WHO dan memperhatikan perkembangan penyakit di Indonesia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyampaikan bahwa pertahanan terdepan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 diantaranya adalah pemakaian masker oleh semua orang ketika berada di luar rumah dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Masker bagian dari alat pelindung wajah khususnya untuk melindungi membran mukosa pada mulut dan hidung ketika berinteraksi dengan orang lain. Masker dianjurkan untuk selalu digunakan ketika keluar rumah. Covid-19 adalah jenis virus yang menular melalui droplet[39].

Selain memakai masker, cuci tangan juga menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah penyebaran infeksi. Cuci tangan adalah suatu prosedur atau tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir yang dilakukan selama 40-60 detik atau Hand rub dengan antiseptik (berbasis alkohol) yang dilakukan selama 20-30 detik. Mencuci tangan merupakan teknik dasar yang paling penting dalam pencegahan dan pengontrolan infeksi. Tangan tenaga pemberi layanan kesehatan seperti perawat merupakan sarana yang paling lazim dalam penularan infeksi nosokomial, untuk itu salah satu tujuan primer cuci tangan adalah mencegah terjadinya infeksi nosokomial serta mengurangi transmisi mikroorganisme[40].

---

[38] Harris Y. P. Sibuea, *Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Dan Bali*, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* ((Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2021).

[39] Wati N. M. N. et al, "Optimalisasi Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Pada Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Penularan Virus COVID-19," *Jurnalempathy.Com* 1, no. 1 (2020): 1–8., https://doi.org/doi: 10.37341/jurnalempathy.v1i1.1.

[40] Suratun, *Klien Gangguan Sistem Muskuloskeletal* (Jakarta: EGC, 2008).

4. Ketentuan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction Tes (tes PCR)

Tes PCR merupakan satu-satunya metode yang diakui untuk mendeteksi infeksi Covid19 pada manusia dengan cepat dan akurat. Cara kerja RT-PCR yaitu: pertama, enzim reverse transcriptase digunakan untuk mengubah RNA, yang merupakan materi genetik SARS-CoV2, dari sampel usap nasofaring, menjadi DNA (tahap transkripsi terbalik). Selanjutnya, dengan menggunakan primer spesifik, sebagian DNA hasil sintesis yang berasal dari virus diamplifikasi menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR). Hanya sampel swab yang mengandung RNA manusia dan virus yang akan menunjukkan hasil positif[41].

Dalam Surat Edaran Kementian Kesehatan Republik Indonesia (2021: 1) Nomor HK 02.02/1/3843/2021 dijelaskan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan tarif tertinggi tes PCR dikarenakan tes PCR merupakan salah satu metode yang menjadi standar utama dalam mengindentifikasi virus Covid-19. Selain itu, penerapan tarif tertinggi ini diberlakukan guna mempercepat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sehingga dapat memberikan kepastian bagi pihak terkait yang membutuhkan fasilitas tes PCR.

Seiring dngan kebijakan pemerintah yang menganjurkan masyarakat wajib tes PCR atau tes Antigen saat berpergian atau aktivitas, harga tes PCR sudah turun jauh dibandingkan di awal pandemi Covid-19 merebak[42]. Saat awal merebaknya kasus Covid-19 di Indonesia pada permulaan tahun 2020, harga tes PCR sempat dipatok di atas Rp 2 juta untuk sekali tes. Bahkan ada beberapa rumah sakit dan lab kesehatan yang mematok biaya tes PCR sebesar Rp 2,5 juta seperti yang diungkapkan Kepala BNPB sekaligus sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 tahun 2020 yaitu

---

[41] Djalante R. et al., "Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020," *Elsevier: Progress in Disaster Science* 6 (2020): 1–9, https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091 2.

[42] Sijabat H. et al, "PCR Test Juridical Review for Prospective Domestic Airplane Passengers," *Legar Brieff* 11, no. 2 (2022): 904–914.

Doni Modardo. Bahkan menurut Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basir, pada awal masa pandemi Covid-19, sempat ada sejumlah pihak yang membanderol harga tes PCR sebesar Rp 3,5 juta karena memang tidak di tetapkan oleh pemerintah[43].

Saat ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait harga tes PCR adalah pemeriksaan tes RT-PCR dipulau Jawa dan Bali sebesar Rp 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Sedangkan diluar pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Batas tarif tertinggi untuk tes PCR berlaku untuk masyarakat yang melakukan tes secara sendiri atau mandiri. Batas tarif tertinggi tidak berlaku untuk tes PCR dalam penelusuran kontak atau rujukan kasus Covid-19 ke Rumah Sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan RT-PCR dari pemerintah atau bagian dari jaminan pembiayaan pasien Covid-19.

5. Vaksinasi Covid-19

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2). 3. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

[43] Muhammad Idris, "Ironi Harga Tes PCR: Dulu Bayar Rp 2,5 Juta, Kini Cuma Rp 275 Ribu," 2021.

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk:

a. Mengurangi transmisi/penularan COVID-19
b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19
c. Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity)
d. Melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dilakukan mengingat penyebaran Covid-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteran masyarakat di Indonesia. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran Covid-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.

Upaya penanggulangan Covid-19 harus terus dilakukan secara masif dengan beberapa strategi mengingat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telah memberikan dampak besar bagi perekonomian dan kehidupan sosial. Tingkat kerentanan masyarakat juga semakin meningkat yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit melalui upaya vaksinasi.

Vaksinasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit menular berbahaya. Sejarah telah mencatat besarnya peranan vaksinasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan bahkan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Vaksinasi (PD3I). Dalam upaya

penanggulangan pandemi Covid-19, vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd imunity*) dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Pandemi Covid-19 yang dihadapi dunia saat ini juga menerapkan upaya vaksinasi dalam upaya menghentikannya. Pandemi ini diumumkan pada awal tahun 2020 lalu oleh adanya Virus Covid-19. Vaksinasi yang saat ini dicanangkan atas upaya pencegahan roses penularan Covid-19 kepada manusia harus diperantarai oleh reservoir kunci yaitu alpha coronavirus dan betacoronavirus yang memiliki kemampuan menginfeksi manusia. Kontak yang erat dengan pasien terinfeksi Covid-19 akan mempermudah proses penularan Covid-19 antara manusia. Proses penularan Covid-19 disebabkan oleh pengeluaran droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke udara oleh pasien terinfeksi pada saat batuk ataupun bersin. Droplet di udara selanjutnya dapat terhirup oleh manusia lain di dekatnya yang tidak terinfeksi Covid-19 melalui hidung ataupun mulut[44]. Penyerangan Virus Covid-19 ini terhadap imun tubuh disolusikan dengan produk biologi vaksin. Pihak pemerintah menjelaskan bahwa vaksinasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pencegahan terjangkit virus Covid-19.

Pelaksanaan vaksinasi program untuk kelompok prioritas penerima vaksin dalam setiap tahapan dapat berubah yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan ketersediaan vaksin dan kondisi tertentu serta mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dan pertimbangan dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

[44] Shereen M. A. et al, "OVID-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses," *Journal of Advanced Research* 24 (2020): 91–98.

Berdasarkan ketersediaan Vaksin Covid-19 ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin Covid-19 sebagai berikut:

a. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. Masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik;
c. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi;
d. Masyarakat lainnya.

Pelayanan Vaksinasi Program dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat/swasta, yang memenuhi persyaratan.

C. Analisis Wacana

Analisis wacana merupakan analisis linguistik terhadap penggunaan bahasa lisan maupun tulis yang melibatkan orang penyampai pesan dengan penerima pesan dalam tindak komunikasi[45]. Analisis wacana bertujuan untuk mengetahui adanya pola – pola atau tatanan yang di ekspresikan oleh suatu teks. Interpretasi satu unit kebahasaan dapat diketahui secara jelas termasuk pesan yang ingin disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana pesan disampaikan.

Fairclough berpendapat bahwa wacana adalah pemakaian bahasa tampak sebagai sebuah bentuk praktik sosial, dan analisis wacana adalah analsis bagaimana teks bekerja/berfungsi dalam praktik sosial budaya. Analisis seperti ini mengutamakan perhatian pada bentuk, struktur, dan organisasi tekstual pada semua tataran: fonologis, gramatikal, leksikal, dan tataran yang lebih tinggi dari organisasi tekstual yang berkenaan dengan system perubahan (pembagian giliran percakapan), struktur argumentasi, dan tipe aktivitas[46].

Henry Guntur Tarigan mengemukakan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas,

[45] Slembrouck S., *What Is Meant by Discourse Analysis* (Belgium: Ghent University, 2009).
[46] Fairclough, *Critical Discourse Analysis (New York)* (Addison Wesley Longman, 1995).

berkesinambungan, dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis[47]. Sebagaimana dikutip ulang oleh Sumarlan menyatakan bahwa wacana adalah seperangkat proposisi yang saling berhubungan untuk menghasilkan suatu rasa kepaduan atau rasa kohesi bagi penyimak atau pembaca. Kohesi atau kepaduan itu sendiri harus muncul dari isi wacana, tetapi banyak sekali rasa kepaduan yang dirasakan oleh penyimak atau pembaca harus muncul dari cara pengutaraan, yaitu pengutaraan wacana tersebut[48].

Sedangkan dalam ranah sosiologi, Eriyanto mengatakan wacana menunjuk terutama pda hubungan antara konteks sosial dari pemakaian bahasa. Dalam pengertian linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih besar dari kalimat. Analisis wacana dalam studi linguistik ini merupakan reaksi dri bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan pada unit kata, frase atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan dari unsur tersebut. Analisis wacana, kebalikan dari linguistik formal. Linguistik formal justru memusatkan perhatian pada level di atas kalimat seperti hubungan gramatikal yang terbentuk pada level yang lebih besar dari kalimat[49].

Pandangan dari kaum kritis sebagai kelompok ketiga ingin mengoreksi pandangan kaum kontrukstivisme. Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada kontelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena sangat erat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat[50].

Dalam khasanah studi analisis tekstual, analisis wacana masuk dalam paradigma penelitian kritis, suatu paradigma berpikir yang melihat pesan sebagi petarungan kekuasaan, sehingga teks berita dipandang sebagai bentuk dominasi dan hegemoni suatu kelompok kepada kelompok lain. Wacana dengan demikian adalah suatu alat representasi di mana suatu kelompok yang

[47] Tarigan Henry Guntur, *Pengajaran Wacana* (Bandung: Angkasa, 2009).
[48] Sumarlan, *Analisis Wacana: Teori Dan Praktik* (Surakarta: Pustaka Cakra, 2003).
[49] Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Jogjakarta: LKiS Group, 2012).
[50] Eriyanto.

dominan memarjinalkan posisi kelompok yang tidak dominan[51]. Melalui pemahaman paradigma kritis ini teori yang digunakan tentu saja bukan diambil dari lingkungan linguistik, tetapi pengertian wacana yang diperkenalkan oleh Michael Foucault dan Althusser. Sumbangan terbesar Foucault terutama adalah mengenalkan wacana sebagai praktik sosial. Wacana berperan dalam mengontrol, menormalkan, dan mendisiplinkan individu. Sementara dalam konsepsi Althusser, wacana berperan dalam mendefinisikan individu dan memposisikan seseorang dalam posisi tertentu[52].

Hikam membagi tiga bahasa dipandang di dalam analisis wacana seperti berikut ini:

1. Pandangan positivisme-empiris

   Titik perhatian pada pendekatan positivisme-empiris didasarkan pada kebenaran bahasa secara gramatikal. Menurut pendekatan ini wacana yang isinya terdapat kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan hubungan antarbagian yang ditandai adanya unsur bahasa. Adapun koherensi adalah hubungan antar bagian yang terdapat makna di dalam sebuah wacana. Pendekatan ini pada analisis wacana hanya fokus pada kebenaran tata bahasa sintaksis atau semantik. Oleh karena itu, kebenaran sintaksis bidang utama pada aliran ini[53].

2. Pandangan konstruktivisme

   Menurut pandangan konstruktivisme, bahasa tidak dipandang dari segi realitas objek dan yang dipisahkan dari subjek dalam penyampaian pernyataan, namun subjek sebagai faktor dalam hubungan sosialnya. Setiap pernyataan dalam wacana adalah tindakan penciptaan makna, yakni tindakan pengungkapan jati diri pembicara. Oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan untuk mengurai makna tertentu[54].

[51] Eriyanto.
[52] Eriyanto.
[53] Eriyanto.
[54] Eriyanto.

3. Pandangan kritis

Pandangan ini dianggap belum menganalisis faktor dari hubungan kekuasaan dalam setiap wacana yang dapat membentuk subjek dan perilakunya. Pandangan ini kurang sensitif pada produksi dan reproduksi makna yang terjadi institusional dan historis. Analisis wacana dalam pandangan kritis menekankan pada konstalasi yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Oleh karena itu, wacana dapat membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Dengan pandangan tersebut, wacana terlibat dalam membentuk subjek, hubungan kekuasaan, dan tindakan representasi.

Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana digunakan untuk membongkar kuasa yang ada dalam setuap proses bahasa seperti, batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan.Dengan pandangan semacam ini, wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Karena memakai perspektif kritis, (paradigma) analisis wacana yang ketiga ini sering juga disebut *Critical Discourse Analysis*.

D. Analisis Wacana Kritis

1. Pengertian

Analisis wacana kritis merupakan pisau analisis yang relatif baru dengan paradigma pengetahuan yang timbul dari tradisi teori sosial dan analisis linguistik kritis. Analisis wacana kritis sudah semakin melebar dan meluas, dari semula kajian unsur bahasa (kalimat atau klausa) kepada dimensi sosial yang lebih luas[55].

[55] Santoso, *Bahasa, Masyarakat Dan Kuasa: Topik-Topik Kritis Dalam Kajian Ilmu Bahasa* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2006).

Analisis wacana kritis didefinisikan sebagai proses penguraian atau suatu upaya dalam mengeksplanasi teks (dimensi sosial) yang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang memiliki kecenderungan tujuan untuk memperoleh apa yang diinginkan, sehingga terdapat konteks yang harus disadari akan adanya kepentingan. Oleh sebab itu, analisis yang terbentuk selanjut-nya disadari telah dipengaruhi oleh penulis dari berbagai faktor. Di sisi lain, juga harus disadari pula bahwa di balik wacana itu terdapat makna dan perspektif yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan[56].

Analisis wacana kritis merupakan upaya untuk menjelaskan suatu teks pada fenemona sosial untuk mengetahui kepentingan yang termuat didalamnya. Wacana sebagai bentuk praktis sosial dapat dianalisis dengan analisis wacana kritis untuk mengetahui hubungan antara wacana dan perkembangan sosial budaya dalam domain sosial yang berbeda dalam dimensi linguistik[57].

Sejalan dengan pendapat Fairclough (1995) bahwa analisis wacana kritis mengkaji tentang upaya kekuatan sosial, pelecehan, dominasi, dan ketimpangan yang direproduksi dan dipertahankan melalui teks yang pembahasannya dihubung -kan dengan konteks sosial dan politik. Wacana harus dilihat secara simultan sebagai:

a. Teks-teks bahasa, baik lisan atau tulisan
b. Praksis kewacanaan, yaitu produksi teks dan interpretasi teks
c. Praksis sosiokultural, yakni perubahan-perubahan masyarakat, institusi, kebudayaan yang menentu-kan bentuk dan makna sebuah wacana, yang kemudian disebut sebagai dimensi wacana[58].

Dengan demikian hakikatnya menganalisis wacana secara kritis yakni menganalisis tiga dimensi wacana tersebut. Ketiganya merupakan integrasi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya[59].

---

[56] Darma, *Analisis Wacana Kritis* (Bandung: Yrama Widya, 2013).
[57] Darma.
[58] Santoso, *Bahasa, Masyarakat Dan Kuasa: Topik-Topik Kritis Dalam Kajian Ilmu Bahasa*.
[59] Santoso.

2. Prinsip-Prinsip Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis, di antaranya politik, ras, gender, kelas sosial, dan hegemoni. Selanjutnya, Fairclough meringkas prinsip-prinsip ajaran analisis wacana kritis sebagai berikut[60]:

a. Membahas masalah-masalah sosial
b. Mengungkap relasi-relasi kekuasaan adalah diskursif
c. Mengungkap budaya dan masyarakat
d. Bersifat ideologi
e. Bersifat historis
f. Mengemukakan hubungan antara teks dan masyarakat
g. Bersifat interpretatif dan eksplanatori

3. Ciri-Ciri Analisis Wacana Kritis

Mengutip apa yang dipaparkan dalam buku analisis wacana[61], berikut ini merupakan hal-hal yang mencirikan sebuah analisis wacana kritis:

a. Tindakan

Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Atau wacana juga dipahami sebagai bentuk interaksi. Jadi wacana merupakan sesuatu yang bertujuan, misalnya apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, dan sebagainya. Wacana juga merupakan sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol.

b. Konteks

Mengacu pada pendapat Guy Cook, dalam analisis wacana juga memeriksa konteks dari komunikasi seperti siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa; dalam jenis khalayak dan situasi apa; melalui medium apa; bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk masing-masing pihak. Sehubungan dengan konteks dalam wacana, Fillmore mengungkapkan betapa pentingnya peran konteks untuk menentukan

[60] Darma, *Analisis Wacana Kritis*. (Bandung: Yrama Widya, 2013).
[61] Darma.

makna suatu ujaran, bila konteks berubah maka berubah pula maknanya. Sementara Lubis membedakan konteks dalam pemakaian bahasa menjadi empat macam:

1) Konteks fisik yang meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi, objek yang disajikan dalam peristiwa komunikasi itu, dan tindakan atau perilaku dari para peran dalam komunikasi itu
2) Konteks epistemis atau latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh pembicara maupun pendengar
3) Konteks linguistik yang terdiri dari kalimatkalimat atau tuturan-tuturan yang mendahului satu kalimat atau tuturan tertentu dalam peristiwa komunikasi
4) Konteks sosial yaitu relasi sosial dan latar setting yang melengkapi hubungan antara pembicara (penutur) dengan pendengar[62].

c. Historis

Untuk dapat memahami suatu wacana teks maka dapat dilakukan dengan memberikan konteks historis di mana teks itu diciptakan. Oleh karena itu pada saat menganalisis perlu dimengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan sebagainya.

d. Kekuasaan

Semua wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun dipandang sebagai bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Hubungan antara kekuasaan dan wacana dapat dilihat dari apa yang dinamakan kontrol. Kontrol dalam suatu wacana dapat berupa kontrol atas konteks, dan kontrol terhadap struktur wacana. Kontrol atas konteks misalnya dapat dilihat dari siapa yang boleh atau harus bicara sedangkan posisi yang lain sebagai pendengar atau yang mengiyakan. Sedangkan kontrol terhadap struktur wacana dapat dilihat

[62] Darma.

dari seseorang yang memiliki kekuasaan lebih besar dapat menentukan bagian mana yang perlu ditampilkan dan bagian mana yang tidak serta bagaimana ia harus ditampilkan.

e. Ideologi

Wacana digunakan sebagai alat oleh kelompok dominan untuk mempersuasi dan mengkomunikasikan kekuasaan yang mereka miliki agar terlihat absah dan benar dimata khalayak. Suatu teks, percakapan dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi tertentu. Menurut teori-teori ideologi dikatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka.

4. Model-Model Analisis Wacana Kritis

Dalam analisis wacana kritis dikenal adanya beberapa pendekatan diantaranya adalah:

a. Analisis Bahasa Kritis

Analisis Bahasa Kritis dikembangkan oleh sekelompok pengajar di Universitas East Anglia pada tahun 1970an. Pendekatan ini memusatkan analisis wacana pada bahasa dan hubungannya dengan ideologi. Jadi ideologi diamati berdasarkan pilihan bahasa maupun struktur gramatika yang dipakai. Bahasa digunakan seseorang untuk membawa ideologi tertentu melalui kata atau struktur gramatika yang dipilihnya. Model analisis yang dikembangkan oleh Fowler, dkk dikenal dengan nama pendekatan Critical Linguistics. Pokok pemikiran model analisis ini dikembangkan berdasarkan penjelasan Halliday mengenai struktur dan fungsi bahasa. Berangkat dari pemikiran itulah Fowler, dkk mempelajari tata bahasa dan praktik pemakaiannya untuk mengetahui praktik ideologi. Elemen bahasa yang dipelajari Fowler, dkk adalah: 1) Kosakata, dan 2) Tata Bahasa[63].

[63] Darma.

b. Analisis Wacana Pendekatan Prancis

Analisis Wacana Pendekatan Prancis disebut juga Pendekatan Pecheux. Pendekatan ini dipengaruhi oleh teori ideologi Althusser dan teori wacana Foucault. Pecheux memandang bahasa dan ideologi bertemu pada pemakaian bahasa, dan materialisasi bahasa pada ideologi. Pecheux memberikan perhatian pada efek ideologi dari diskursus yang memposisikan seseorang sebagain subjek dalam situasi sosial tertentu. Oleh sebab itu bahasa dipandang sebagai medan pertarungan melaluinya berbagai kelompok dan kelas sosial berusaha menanamkan keyakinan dan pemahamannya[64].

c. Pendekatan Kognisi Sosial

Pendekatan Kognisi Sosial merupakan pendekatan yang dikembangkan di Universitas Amsterdam, Belanda dengan tokoh utamanya adalah Teun A. van Dijk. Van Dijk dan teman-teman mengangkat persoalan etnis, rasialisme, dan pengungsi dalam menganalisis berita-berita di surat kabar Eropa pada tahun 1980an. Hasilnya van Dijk menemukan bahwa faktor kognisi menjadi unsur penting dalam produksi wacana. Produksi wacana akan mengikutsertakan pula suatu proses kognisi sosial. Model analisis van Dijk disebut juga sebagai kognisi sosial. Menurut van Dijk dalam menganalisis wacana tidak hanya menganalisis teks semata namun perlu diamati pula bagaimana teks tersebut diproduksi, kenapa teks semacam itu diproduksi. Van Dijk banyak melakukan penelitian terutama terkait dengan pemberitaan yang memuat rasialisme dan diungkapkan melalui teks. Percakapan sehari-hari, wawancara kerja, rapat pengurus, debat di parlemen, propaganda politik, periklanan, artikel ilmiah, editorial, berita, photo, film merupakan hal-hal yang diamati van Dijk[65].

---

[64] Miles M. B. et al, *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992).
[65] Miles M. B. et al.

d. Pendekatan Wacana Sejarah

Pendekatan Wacana Sejarah dikembangkan oleh sekelompok pengajar di Vienna yang dipimpin oleh Ruth Wadok. Pendekatan ini dipengaruhi oleh pemikiran Jurgen Habermas. Menurut Wadok dan kawan-kawan, dalam menganalisis wacana harus disertakan pula konteks sejarah bagaimana wacana mengenai suatu kelompok digambarkan[66].

e. Pendekatan Norman Fairclough

Pendekatan Norman Fairclough atau perubahan sosial digunakan untuk menganalisis wacana yang memperhatikan hubungan antara wacana dan perubahan sosial. Fairclough dalam (Eriyanto, 2001:286) memusatkan perhatian wacana pada bahasa. Fairclough menggunakan wacana menunjuk pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial, lebih daripada aktivitas individu atau untuk merefleksikan sesuatu. Wacana adalah bentuk dari tindakan, seseorang menggunakan bahasa sebagai suatu tindakan pada dunia/ realitas. Beberapa ciri analisis wacana kritis dikemukakan oleh Fairclough yang menggabungkan antara kajian linguistik tentang pemikiran sosial politik yang relevan dengan pengembangan teori sosial dan bahasa. Untuk merealisasikannya Fairclough mengajukan pendekatan tiga dimensi, bahwa suatu pemunculan wacana dipandang secara simultan sebagai sebuah teks praktik diskursif dan praktik sosial[67]. Model analisis wacana kritis Norman Fairclough pada dasarnya menganalisis wacana dalam tiga dimensi yaitu teks, *discourse practice*, dan *sociocultural* practice. Dalam teks, teks dianalisis secara linguistik dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat, memasukkan koherensi dan kohesivitas, bagaimana antara kata atau kalimat digabung sehingga membentuk pengertian. *Discourse practice* berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. *Sociocultural practice* berhubungan dengan

[66] Miles M. B. et al.
[67] Darma, *Analisis Wacana Kritis*. (Bandung: Yrama Widya, 2013).

konteks di luar teks dan konteks. Ketiga dimensi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Bagan 2.1

Model analisis wacana kritis Norman Fairclough

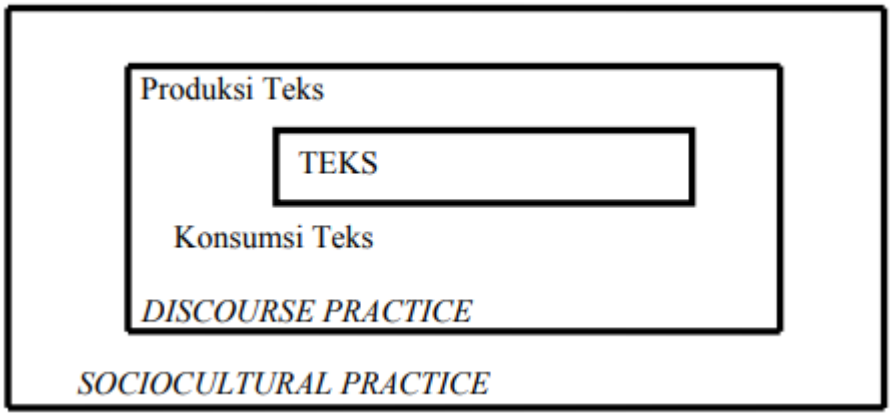

1) Teks

Fairclough melihat teks dalam berbagai tingkatan. Sebuah teks bukan hanya menampilkan bagaimana suatu objek digambarkan tetapi juga bagaimana hubungan antarobjek didefinisikan. Tiga struktur teks dalam model Norman Fairclough[68], yakni:

Tabel 2.1

Struktur teks Norman Fairclough

Unsur	Yang Ingin Dilihat
Representasi	Bagaimana peristiwa, orang, kelompok,situasi, keadaan, atau apa pun ditampilkan dan digambarkan dalam teks.
Relasi	Bagaimana hubungan antara wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks
Identitas	Bagaimana identitas wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks

[68] Eriyanto, "Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media (N. Huda (Ed.); VII)," *LKiS*, n.d.

2) *Discourse Practice*

Titik perhatian pada analisis *discourse practice* model Fairclough adalah bagaimana produksi dan konsumsi teks. Suatu praktik wacana akan menentukan suatu teks dibentuk atau diproduk[69]. *Discourse practice* (praktik diskursif) ini membahas bagaimana sisi individu wartawan atau pengarang dengan melihat latar belakangnya, profesi yang dilakukan, membicarakan proses pencarian berita, hubungan antara pengarang, editor dan penerbit sehingga dapat melahirkan sebuah teks atau karyanya dan bagaimana kekritisan pengarang dalam memproduksi suatu teks sehingga dapat menyuguhkan kalimat-kalimat informatif yang memiliki fungsi menyampaikan untuk menguatkan pemahaman pembaca sehingga menimbulkan perspektif dan kesadaran bagaimana praktik-praktik sosial dalam karyanya sesuai dengan konteks masyarakat pada zaman sekarang.

3) *Sociocultural Practice*

Menurut Norman Fairclough, bagaimana *sociocultural practice* menentukan teks merupakan hubungan tidak langsung, tetapi dimediasi oleh *discourse practice*. Kalau ideologi dan kepercayaan masyarakat itu paternaslistik, maka hubungannya dengan teks akan dimediasi oleh bagaimana teks tersebut diproduksi dalam suatu proses dan praktik pembentukan wacana[70]. Ideologi masyarakat berperan dalam membentuk suatu teks dan suatu teks tidak dapat dilepaskan dari ideologi masyarakat maka ideologi yang dipandang tersebut terserap bagaimana sebuah teks dapat hadir.

E. Komunikasi Pemerintah dalam Perspektif Wacana Kritis

Fokus analisis wacana kritis merupakan praktik kewacanaan yang mengkonstruksi subjek sosial dan hubungan sosial termasuk hubungan kekuasaan dan peran yang dimainkan praktik-praktik kewacanaan untuk

[69] Eriyanto.
[70] Eriyanto.

melanjutkan kepentingan kelompok-kelompok sosial khusus. Analisis ini bekerja menggali praktek-praktek bahasa di balik teks untuk menemukan posisi ideologis dari narasi dan menghubungkannya dengan struktur yang lebih luas. Dengan demikian analisis wacana merupakan salah satu model analisa kritis yang memperkaya pandangan khalayak bahwa ada keterkaitan antara produk media, ekonomi dan politik.

Komunikasi pemerintah pada hakekatnya merupakan proses penyebaran dan pertukaran informasi di dalam dan dengan luar organisasi. Melalui komunikasi pemerintah, maka eksekutif pemerintah bertukar dan membagi informasi dengan yang lain, yaitu dengan legislatif, dengan staf, dengan pelaku bisnis, dan dengan masyarakat. Melalui komunikasi, eksekutif pemerintah atau administrator atau manajer pemerintah bermaksud untuk mempengaruhi sikap (*attitude*), pemahaman (*understanding*), dan perilaku (*behavior*) birokrasi dan masyarakat. Dengan demikian, tiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah demokratis merupakan bagian dari proses komunikasi pemerintah, baik sebagai sender di satu waktu, dan di waktu lain ia menjadi receiver.

Semua komunikasi selalu mempunyai konsekuensi, dalam arti bahwa komunikasi selalu memiliki signifikansi di balik bentuk dan strukturnya bagi masyarakat dan institusi yang terlibat dalam penyusunan dan penafsiran. Dari pemahaman Birch, komunikasi akan selalu berkaitan dengan aktivitas yang memiliki kepentingan yang selalu dimotivasi oleh keinginan tertentu dan melibatkan partisipan tertentu, konteks tertentu, dan peristiwa-peristiwa diskursif tertentu.

Komunikasi yang dihasilkan menjadi komunikasi yang tidak ideal atau tidak normal, dimana terdapat ketidaksejajaran kekuasaan antara orang pertama (pemerintah) dan orang kedua (masyarakat awam). Pemerintah yang memiliki kekuasaan dapat mendayagunakan bahasa untuk kepentingan politik tertentu. Sehingga masyarakat awam seringkali berbuat kekeliruan, kesalaham, ketidakmampuan, dan ketidaktepatan dalam menafsirkan bahasa politik yang dihasilkan oleh para pemegang kekuasaan.

Masih banyak praktik-praktik kebijakan yang mengesampingkan aspek komunikasi pemerintah, sehingga menimbulkan berbagai kesalahpahaman dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bersama dari para perumus dan pemangku kebijakan agar memasukkan strategi komunikasi yang baik sebagai salah satu instrumen untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif.

F. Hasil Penelitian Yang Relevan

Demi meminimalisir adanya kecurangan dan adanya persamaan dengan kajian lain, maka diperlukan telaah lebih dalam demi mendukung keaslian penelitian. Telaah pustaka diuraikan melalui beberapa penelitian terdahulu, yakni

1. Kajian Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19 pada Majalah TEMPO Edisi Maret-Juli 2020 yang dikaji oleh Fadjarini Sulistyowati, Nina Uswatun Hasanah. Metode yang digunakan adalah teknik analisis framing dengan analisis dari Entmann. Hasil penelitian menunjukkan Majalah Tempo menframe bahwa pemerintah belum menerapkan strategi komunikasi dalam penanganan Covid-19, baik pada awal pandemi Covid-19, masa pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan masa normal baru. Majalah Tempo mampu memberikan kontrol terhadap kebijakan yang berkaitan dengan strategi komunikasi pemerintah dalam penanganan Covid-19[71]. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variable penelitian yaitu komunikasi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk menganalisis komunikasi pemerintah dalam pengendalian Covid-19 di media website *covid19.go.id*.
2. Kajian Analisis Wacana Kritis Vidio Penanggulangan Covid-19 Pemerintah Jawa Timur Di Facebook yang dikaji oleh Maulidatus

[71] Sulistyowati F, "Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan COVID-19 Pada Majalah TEMPO Edisi Maret-Juli 2020," *Urnal Riset Komunikasi* 4, no. 2 (2021): 198–214.

Syahrotin Naqqiyah dan Ellyda Retpitasari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis wacana yang dikembangkan oleh Teun Van Dijk. Perencanaan komunikasi PemProv Jatim melalui akun media sosial facebooknya dapat diketahui bahwa dalam menanggulangi pandemi covid-19 ini, pemprov jatim telah memberikan informasi-informasi yang secara skematis di kemas dengan sebaik mungkin secara up to date, sehingga demikian dapat dengan mudah untuk terus di terima serta di konsumsioleh masyarakat[72]. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variable penelitian yaitu komunikasi dalam Penanganan Covid-19. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk menganalisis komunikasi pemerintah dalam pengendalian Covid-19 di media website *covid19.go.id*

3. Kajian Analysis of the Government's Crisis Communication Strategy Discourse to Defend Covid-19 yang dikaji oleh Anton Surahmat, Susanne Dida, Feliza Zubair. Penelitian ini bertujuan untuk menguak strategi komunikasi krisis pemerintah dengan metode Analisis Wacana Kritis Van Dijk yang berfokus pada dimensi teks dan konteks sosial. Strategi komunikai krisis pemerintah sejak fase prakrisis hingga krisis mengalami dinamika dari segi implementasi SCCT. Pada fase prakrisis, pernyataan pejabat publik khususnya dalam hal ini Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengarah pada bentuk – bentuk Deny dan Diminish. Sembari tetap menyertakan strategi komunikasi berupa Adjusting Information dan Instructive Information demi memberikan informasi kepada publik agar tetap tenang dan waspada. Namun pada fase krisis, komunikasi pemerintah bergeser dalam rupa pernyataan Diminish saja dimana Justification bahwa Covid-19 tidak semenakutkan apa yang diberitakan menjadi gagasan utama yang muncul pada pernyataan Presiden Jokowi dan Jubir dr. Achmad Yurianto. Pemerintah justru gagap dan tidak konsisten dalam mengomunikasikan kebijakannya terkait penanganan COVID-19 selama prakrisis dan krisis sehingga menimbulkan keresahan baik berupa misinformasi maupun

[72] Naqqiyah M.S. & Retpitasari, "Analisis Wacana Kritis Vidio Penanggulangan Covid-19 Pemerintah Jawa Timur Di Facebook," *Connected: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2020): 10–17.

disinformasi di masyarakat[73]. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variable penelitian yaitu komunikasi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk menganalisis komunikasi pemerintah dalam pengendalian Covid-19 di media website *covid19.go.id.*

4. Kajian Komunikasi Politik Jokowi: Analisis Wacana Kritis, yang dikaji oleh D. Jupriono, Agus Sukristyanto dan Arief Darmawan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) versi van Dijk dan Fowler. Hasil penelitian menunjukan 2 hal, yaitu pertama, sesuatu yang tidak berisiko, yang positif, yang mengandung informasi keberhasilan, yang tidak berpotensi mengundang kritik, akan disampaikan Jokowi pada pidato Jokowi 2015-2016 dengan retorika berbentuk kalimat aktif. Kedua, kalimat pasif hampir selalu digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang kurang positif, yang berpotensi memicu kritik, yang memungkinkan Jokowi sebagai pelaku (*agent*) untuk bersembunyi. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa untuk menyampaikan keberhasilan, retorika Jokowi memilih bentuk aktif, sedang untuk menyampaikan kegagalan, Jokowi dalam batas-batas tertentu akan menggunakan bentuk kalimat pasif[74]. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variable penelitian yaitu komunikasi. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk menganalisis komunikasi pemerintah dalam pengendalian Covid-19 di media website *covid19.go.id*
5. Kajian Analisis Wacana Kritis Vidio Penanggulangan Covid-19 Pemerintah Jawa Timur Di Facebook, yang dikaji oleh Maulidatus Syahrotin Naqqiyah dan Ellyda Retpitasari. Penelitian ini menggunakan

[73] Surahmat A. Dida S. & Zubair F., "Analysis of the Government's Crisis Communication Strategy Discourse to Defend Covid-19," *Jurnal Komunikasi* 13, no. 1 (2021): 36–53.
[74] Jupriono D. et al, "Komunikasi Politik Jokowi: Analisis Wacana Kritis.," *In Prosiding Seminar Nasional Bahasa & Sastra* 8 (2016): 44–50.

jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis wacana yang dikembangkan oleh Teun Van Dijk. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perencanaan komunikasi PemProv Jatim melalui akun media sosial facebooknya dapat diketahui bahwa dalam menanggulangi pandemi covid-19 ini, pemprov jatim telah memberikan informasi-informasi yang secara skematis di kemas dengan sebaik mungkin secara *up to date,* sehingga demikian dapat dengan mudah untuk terus di terima serta di konsumsi oleh masyarakat[75]. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel penelitian yaitu komunikasi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19. Selian itu, peneliti menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk menganalisis komunikasi pemerintah dalam pengendalian Covid-19 di media website *covid19.go.id*

6. Kajian Buzzer Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Analisis Wacana Kritis Kicauan Buzzer Di Twitter, yang dikaji oleh Hanif Jati Pambudi, Ario Lukito Adi Nugroho , Liliek Handoko, dan Firstya Evi Dianastiti. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis wacana kritis dari Norman Fairclough dengan mengulang pembahasan pada dimensi tekstual, praktik wacana, dan dimensi sosiokultural. Data diperoleh dari kicauan akun Twitter @permadiaktivis1 selama masa pandemi Covid-19 berlangsung. Buzzer dalam kajian ini diposisikan sebagai key opinion leader yang mampu melakukan polarisasi informasi terkait pandemi Covid-19. Representasi pandemi dicitrakan sebagai sesuatu yang negatif untuk menegaskan ketidak-mampuan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pandemi. Kicauan yang dihasilkan tidak pernah menyalahkan kebijakan pemerintah. Selain itu, sindiran dan ajakan menjadi pola dari kicauan. Kebijakan vaksinasi dikemas dengan cara menyindir pihak-pihak yang meragukan vaksinasi maupun yang menolak. Kicauan yang dihasilkan tidak hanya sebatas konsumsi, tetapi juga turut

[75] Naqqiyah, M. S. & Retpitasari, "Analisis Wacana Kritis Vidio Penanggulangan Covid-19 Pemerintah Jawa Timur Di Facebook.," *Connected: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2020, 10–17.

memberikan polarisasi informasi. Kicauan terkait sindiran pihak yang meragukan vaksin memperlihatkan bahwa buzzer mempunyai peran untuk mendukung kebijakan pemerintah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variable penelitian yaitu komunikasi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough.

G. Kerangka Berpikir

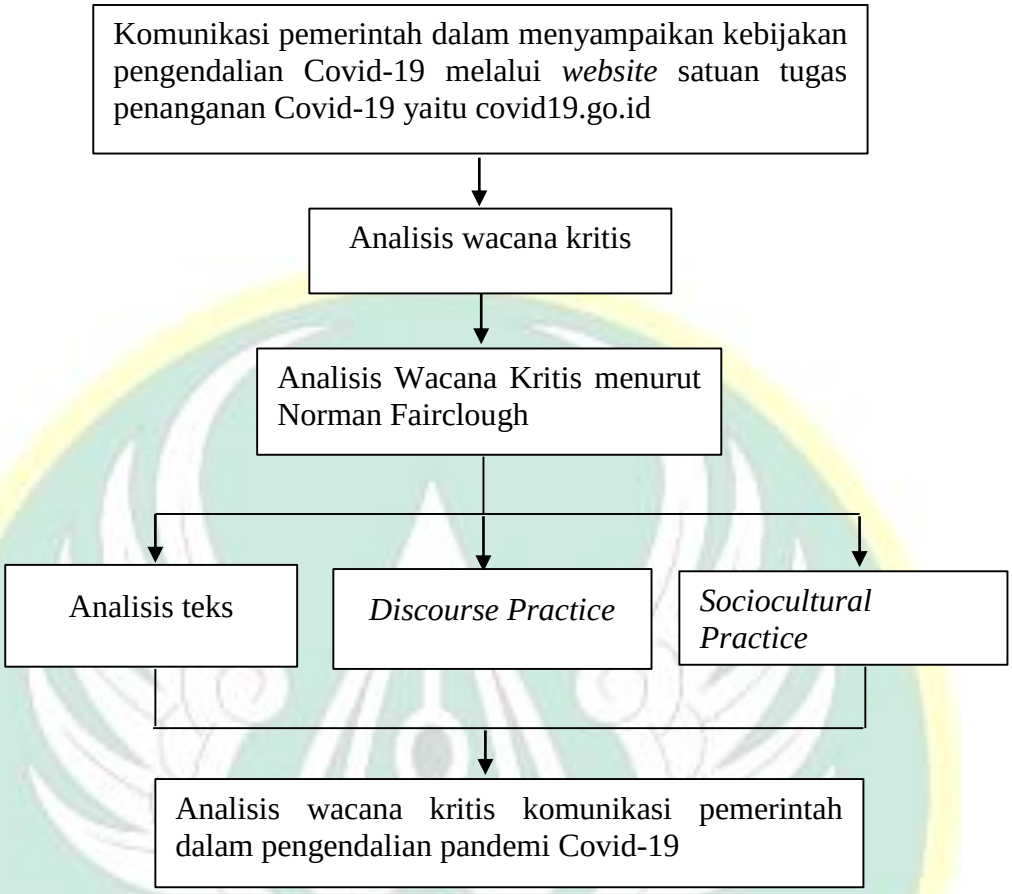

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir

Komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan pengendalian covid 19 melalui *website* satuan tugas penanganan covid 19 yaitu covid19.go.id sebagai fokus kajian penelitian. Karena komunikasi pemerintah menjadi salah satu faktor keberhasilan pengendalian covid 19. Dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough yaitu dengan tiga dimensi yaitu analisis teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice.* Dengan tiga dimensi ini, peneliti akan menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia[1].

Penelitian ini akan menganalisis dokumen pemberitaan dengan pendekatan kualitatif yaitu melihat, membaca, memahami, dan menafsirkan makna isi komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan pengendalian Covid-19.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan pengendalian Covid-19 dalam *website* satuan tugas penanganan Covid-19 yaitu *covid19.go.id* dari April 2020 sampai dengan Agustus 2022.

C. Data dan Sumber Data

1. Sumber data primer

   Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan pengendalian Covid-19 yang disampaikan melalui *website* satuan tugas penanganan Covid-19 yaitu *covid19.go.id*.

2. Sumber data sekunder

   Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bacaan yang relevan dengan penelitian baik pustaka berupa buku atau jurnal penelitian.

---

[1] Creswell W. John, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diambil dari berita di laman www.covid19.go.id terkait komunikasi pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Adapun prosedur dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuka laman www.covid19.go.id
2. Memilih berita yang disesuaikan dengan masing-masing kebijakan yaitu PSBB, PPKM, anjuran memakai masker dan cuci tangan, PCR, dan vaksinasi sesuai dengan kebutuhan penelitian
3. Mengidentifikasi kalimat langsung dan tidak langsung pada masing-masing pemberitaan.
4. Menganalisis dengan dengan menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough.
5. Menyusun laporan hasil penelitian

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis menurut Darma adalah sebuah upaya atau proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan[2].

Ada beberapa proses yang akan saya jalani dalam penelitian ini. Proses pertama adalah pengumpulan data. Data-data yang diambil dalam penelitian ini berupa teks berita yang diambil dari *website covid19.go.id*. Kemudian proses kedua, data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough. Proses analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini mencakup analisis-analisis berikut:

[2] Darma, *Analisis Wacana Kritis*. (Bandung: Yrama Widya, 2013).

1. Analisis Teks

Analisis teks berita akan difokuskan pada tiga unsur, yaitu representasi, relasi, dan identitas. Representasi merupakan tampilan atau gambaran peristiwa, orang, kelompok, situasi, dan keadaan yang ada di dalam teks. Relasi merupakan tampilan atau gambaran hubungan antara penulis, khalayak, dan partisipan berita yang terdapat di dalam teks. Sementara itu, yang dimaksud dengan identitas adalah tampilan atau gambaran identitas penulis, khalayak, dan partisipan berita yang juga terdapat di dalam teks. Ketiga unsur tersebut akan tercermin dalam analisis-analisis bahasa.

Dalam analisis bahasa, wujud-wujud kebahasaan yang terdapat di dalam teks akan dianalisis dengan pendekatan linguistik. Namun, setiap kata atau kalimat yang terdapat di dalam teks tidak akan dibahas satu persatu secara detil. Wujud-wujud kebahasaan yang akan dibahas secara detil adalah wujud-wujud kebahasaan yang paling menarik apabila ditinjau dari pandangan kritis.

Dalam analisis bahasa teks ini akan dikaji beberapa hal. Pertama, pada tingkat kosakata, dilihat kosakata apa yang dipakai untuk menampilkan atau menggambarkan sesuatu di dalam teks sehingga apa yang digambarkan tersebut seolah-olah sengaja dimasukkan ke dalam kategori tertentu oleh penulis/media yang memberitakannya. Selanjutnya, pada tingkat tata bahasa akan melihat apakah tata bahasa ditampilkan dalam bentuk proses ataukah dalam bentuk partisipan. Apabila berbentuk proses, akan dilihat apakah proses tersebut berupa tindakan, peristiwa, keadaan, ataukah proses mental. Sementara itu, apabila tata bahasa ditampilkan dalam bentuk partisipan, akan melihat bagaimana partisipan ditampilkan. Selain itu, tata bahasa juga akan dilihat berdasarkan struktur fungsi pragmatisnya (tema) untuk mengetahui informasi mana yang dipentingkan penulis dalam teks.

Proses selanjutnya, akan melihat kutipan-kutipan pembicaraan partisipan publik yang ditampilkan dalam rangkaian kalimat

(paragraf), apakah berupa kutipan langsung, tidak langsung, ringkasan, ataukah berupa formulasi penulis.Selain itu juga akan melihat ada tidaknya misrepresentasi dalam teks, yaitu penggambaran seseorang, suatu kelompok, suatu pendapat, atau suatu gagasan dengan tidak sebagaimana adanya, tetapi digambarkan secara buruk. Tinjauan terhadap misrepresentasi ini menjadi sangat penting karena misrepresentasi merupakan salah satu strategi penulis/media untuk mengungkapkan pandangannya secara implisit di dalam pemberitaan. Hasil dari analisis bahasa ini akan digunakan sebagai bukti penguat analisis selanjutnya, yaitu analisis praktik wacana.

2. Analisis Praktik Wacana *(Discourse Practice)*

   Analisis praktik wacana memfokuskan perhatian pada aspek produksi dan konsumsi teks. Analisis praktik wacana ini akan dilakukan bersamaan dengan analisis teks sehingga ketika analisis teks dilakukan, juga akan melihat bagaimana teks tersebut diproduksi dan dikonsumsi

3. Analisis Praktik Sosial Budaya (*Sociocultural Practice*)

   Dalam analisis praktik sosial budaya ini saya akan mengaitkan analisis teks dan praktik wacana dengan konteks sosial dan budaya yang ada. Sama halnya dengan analisis praktik wacana, analisis praktik sosial budaya ini pun akan dilakukan secara bersamaan dengan analisis teks. Setelah proses analisis data, akan ditarik kesimpulan mengenai pandangan, dan strategi wacana satuan tugas penanganan covid 19 yang tercermin melalui teks dalam *website* covid19.go.id.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Laman www.covid19.go.id

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada tanggal 18 Maret 2020 meluncurkan portal www.covid19.go.id sebagai sumber informasi resmi penanggulangan virus corona yang kini menjadi pandemi global Covid-19. Situs ini diharapkan bisa menjadi rujukan resmi untuk informasi satu pintu mengenai virus corona dan bagaimana mengendalikannya. Situs covid19.go.id dikembangkan oleh Tim Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat untuk Penanggulangan Covid-19. Tim terdiri dari berbagai elemen yaitu pemerintah, Badan PBB (UNICEF, WHO, dll), mitra pembangunan internasional, organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha.

Berhubungan dengan pelaksanaan fungsi operasional, pemerintah berperan sebagai pihak yang paling utama, melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyusun strategi penanganan Covid-19 yang diinformasikan melalui situs www.covid19.go.id. WHO dan UNICEF sebagai *aid provider* berperan dalam menyediakan bantuan operasional dengan membantu melalui program-program bantuan yang telah direncanakan bersama. Waya Quiviger mendefinisikan bantuan luar negeri merupakan segala jenis bantuan yang diberikan oleh lembaga donor internasional, negara, ataupun pemerintah dan dapat berupa pinjaman maupun dalam bentuk barang atau jasa[1]. Terdapat dua jenis kategori *foreign aid* menurut John W. McArthur, *Humanitarian Aid* yakni bantuan yang diberikan dalam keadaan darurat yang bertujuan untuk menangani krisis kemanusiaan akibat dari adanya peristiwa tertentu seperti pandemi. Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan obat-obatan, bantuan pangan hingga fasilitas pendidikan. Kategori *foreign aid* yang kedua

[1] Williams V. C., "Assuming Identities, Enhancing Understanding: Applying Active Learning Principles to Research Projects," *Journal of Political Science Education* 2, no. 2 (2006): 171–86.

adalah *Development Aid* merupakan bantuan yang diberikan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik[2]. Untuk kasus permasalahan pada masa pandemi Covid-19 ini *Humanitarian Assistance* merupakan salah satu jenis bantuan yang tepat untuk digunakan oleh WHO dan UNICEF sebagai organisasi internasional. Organisasi internasional dalam menjalankan peranan sebagai *Aid Provider*, diwujudkan dalam bentuk *Humanitarian Assistance*. Menurut Heike Spieker, *Humanitarian Assistance* adalah sebuah tindakan memberikan bantuan dalam bentuk kemanusiaan yang bertujuan untuk meringankan penderitaan, menjamin pemenuhan hakhak manusia, hingga misi penyelamatan hidup untuk para korban yang terdampak situasi genting seperti pandemi[3]. Program WHO dan UNICEF secara global dalam pengendalian pandemi Covid-19 menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan kebijakan pengendalian pandemi di Indonesia yang selanjutnya diinformasikan secara resmioleh pemerintah melalui portal www.covid19.go.id.

Organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha berperan dalam kegiatan dibidang edukasi seperti direalisasikan dengan pembuatan konten media sosial dan brosur terkait promosi kesehatan ketika beribadah atau di fasilitas publik yang sumber informasinya dari portal www.covid19.go.id. Peran lain yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha adalah penyediaan layanan kesehatan seperti desibfektan, alat pelindung diri terutama masker, pembuatan tempat cuci tangan, pengelolaan limbah dan tempat isolasi sebagai bentuk dukungan organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam ikut serta menginformasikan program pengendalian Covid-19 yang di lakukan pemerintah.

---

[2] McArthur J. A. & Conway K. B., "Exploring the Relationship between Studentinstructor Interaction on Twitter and Student Perceptions of Teacher Behaviors.," *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 2012.

[3] Spieker H., *The Right to Give and Receive Humanitarian Assistance. In International Law and Humanitarian Assistance*, ed. Springer (Berlin, 2011).

Situs ini bertujuan untuk memastikan publik mendapatkan akses pada informasi resmi dan akurat mengenai penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia. Situs www.covid19.go.id memuat pesan tentang 3 langkah penting untuk dilakukan masyarakat yaitu cara mengurangi risiko penularan, cari informasi yang benar dan apa yang perlu dilakukan bila sakit. Data statistik mengenai jumlah kasus positif Covid-19 diperbarui secara *real-time* dan diharapkan menjadi acuan untuk berbagai pihak, terutama rekan-rekan media dalam pemberitaan mereka. Ada pula Hoax Buster yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah sebuah informasi tentang Covid-19 merupakan berita benar atau hoax. Materi Edukasi berisi mengenai berbagai materi edukasi publik.

Tampilan utama laman situs www.covid19.go.id terdiri dari :

1. Beranda
2. Berita, yang terdiri dari penanganan kesehatan (3M dan 3T), pemulihan ekonomi, vaksinasi Covid-19
3. Sebaran, yang berisi peta sebaran, WNS, situasi Covid-19, peta risiko, dan monitoring kepatuhan protokol kesehatan
4. Peraturan, yang terdiri dari protokol dan regulasi
5. Edukasi
6. Tanya jawab
7. Info penting, yang berisi layanan isolasi mandiri pasien Covid-19, daftar rumah sakit rujukan, daftar hotel karantina, daftar hotel isolasi, tim pakar, kontak layanan kementerian/lembaga, vaksin Covid-19, tentang Covid-19, dan kebijakan privasi.
8. Hoax buster.

Laman www.covid19.go.id memiliki tujuh komponen sebagai website atau laman, yaitu nama domain, header, navbar, menu, konten, social media button, dan footer.

1. Nama domain

   www.covid19.go.id
2. Header

Pertanyaan? COVID-19 Hotline 119

3. Navbar dan Menu

   Navbar atau navigation bar dan Menu dalam laman ini memiliki bentuk yang sama, yaitu meliputi Berita, Sebaran, Protokol, Edukasi, Tanya Jawab, Agenda, Hoaks Buster. Dalam laman ini, setiap komponen Menu ditampilkan dalam bentuk tautan-tautan yang dapat langsung dipilih oleh pengunjung laman. Satu Menu laman dapat terdiri dari satu sampai tiga tautan, yang akan dibahas lebih mendalam dalam pembahasan representasi.

4. Konten

   Konten dalam halaman beranda laman www.covid19.go.id berbentuk tautantautan yang ada dalam setiap menu, kecuali pada Menu Edukasi, yang mana konten ditampilkan dalam bentuk video ilustrasi disertai dengan sebuah takarir. Selain itu, di samping keberadaan Menu sebagai kontennya, dalam halaman beranda laman ini ditampilkan pula:

   a. Headline dengan tiga gambar latar belakang berukuran besar dengan disertai judul yang bergantian secara otomatis yang mengarah ke suatu tautan di halaman lainnya dalam laman tersebut.
   b. Dua tautan di atas headline yang mengarah kepada halaman lainnya.

5. Social Media Button

   Instragam

   Follow on Instagram

6. Footer

   Copyright@2020 Badan Nasional Penanggulangan Bencana All rights reserved

B. Pembahasan

Teks wacana komunikasi pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19 bukan hanya dipandang sebagai teks biasa, tetapi memiliki relasi sosial dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kehadiran teks wacana tersebut memiliki ideologi khusus yang dapat dimaknai secara kritis. Oleh karena itu, berikut ini disajikan data temuan yang dinilai sebagai teks atau istilah wacana yang digunakan sebagai komunikasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengendalian Covid-19. Data temuan komunikasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pegendalian Covid-19 melalui Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1

Data Temuan Komunikasi Pemerintah Dalam Menetapkan Kebijakan Pegendalian Covid-19

Data (teks)	Judul berita
Komunikasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan PSBB dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPKM)	1. Kebijakan PSBB Pilihan Paling Rasional di Tengah COVID-19 (1 april 2020) 2. Satgas Covid-19: Meskipun PSBB Transisi Harus 3M (12 November 2020) 3. 3 Daerah Rujukan Penerapan PPKM Mikro (17 Februari 2021) 4. Satu Visi dan Strategi Tangani COVID-19 (12 April 2020)
Komunikasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan Pakai masker dan cuci tangan pakai sabun	1. Pemerintah Wajibkan Warga Kenakan Masker Saat Beraktivitas di Luar Rumah (6 april 2020) 2. Gerakan Cuci Tangan yang Masif dan Massal Putuskan Penularan COVID-19 (11 Juni 2020)
Komunikasi pemerintah dalam menetapkan	1. Satgas: Manfaatkan Penurunan Harga RT-PCR Sesuai Urgensinya (19 Agustus 2021)

harga PCR	2. Pemerintah Ajak Masyarakat Bantu Kawal Harga Tes PCR yang Baru (20 Agustus 2021)
Komunikasi pemerintah dalam kebijakan vaksinasi	1. Vaksin COVID-19 Gratis Tanpa Syarat, Badan POM Kawal Keamanan dan Efektivitasnya (19 Desember 2020) 2. Tujuan Program Vaksinasi Tercapainya Herd Immunity (14 januari 2021) 3. Fatwa MUI: Vaksinasi COVID-19 dan Tes Swab Tidak Batalkan Puasa (16 April 2021) 4. Berbagai Kebijakan Terkait Ramadhan dan Idul Fitri Tahun Ini Demi Mencapai Hasil Signifikan (20 April 2021) 5. Aturan Baru Perjalanan Dalam Negeri Berlaku Mulai 17 Juli 2022 (10 Juli 2022) 6. Booster Sebelum Mudik & Ikuti Prokes, Cegah Terulangnya Kenaikan Kasus Covid Pasca Lebaran (10 juli 2022)

1. Representasi Teks (Analisis Mikrostruktural) Wacana Komunikasi Pemerintah dalam Pengendalian Covid-19

Representasi teks wacana dalam penelitian ini fokus kepada komunikasi pemerintah dalam pengendalian Covid-19. Teks wacana biasanya memiliki ideologi tertentu, sehingga dapat dianalisis secara mendalam dengan memperhatikan unsur-unsur linguistiknya demi membongkar ideologi teks yang ada di dalamnya. Unsur linguistik meliputi aspek semantik, kosakata, tata kalimat, kohesi, dan koherensi sebagai konstruksi teks wacana[4]. Teks wacana komunikasi pemerintah dalam pengendalian Covid-19 menimbulkan resistensi dan dukungan

[4] Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Jogjakarta: LKiS Group, 2012).

sosial dari masyarakat. Teks wacana tersebut dianggap sebagai langkah pengendalian Covid-19, meskipun ada dominasi subjektivitas dan pertimbangan yang kurang matang. Siswanto & Febriana mengatakan bahwa teks pada wacana dibangun melalui realitas sosial-budaya dan kepentingan yang bersifat subjektif[5]. Kemudian, wacana juga memperhatikan hubungan gramatikal sehingga wacana tersebut termasuk wacana yang baik[6]. Berikut ini merupakan komunikasi pemerintah dalam pengendalian Covid-19 yang di muat dalam *website covid19.go.id* dan dinilai sebagai teks wacana yang dapat dibongkar ideologi dan makna gramatikalnya.

a. Komunikasi Pemerintah Dalam Penetapan PSBB Dan PPKM

PSBB diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020, bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. PSBB memiliki tujuan yang sama dengan wacana lain dalam penanganan Covid-19. Namun, implementasi dari kebijakan tersebut berfokus pada pembatasan aktivitas sosial masyarakat dengan cara meliburkan instansi pemerintah, pendidikan, dan kegiatan keagamaan.

PSBB pertama kali ditetapkan pada 31 Maret 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 selama 8 minggu. Kebijakan PSBB diantaranya adalah peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya,

---

[5] Siswanto A. & Febriana P., "Representasi Indonesia Dalam Stand Up Comedy (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Dalam Pertunjukan Spesial Pandji Pragiwaksono Mesakke Bangsaku)," *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2018): 121–30, https://doi.org/https://doi.org/10.21070/kanal.v5i2.1508.

[6] Widiatmoko W., "Analisis Kohesi Dan Koherensi Wacana Berita Rubrik Nasional Di Majalah Online Detik," *Jurnal Sastra Indonesia* 4, no. 1 (2015): 1–12, https://doi.org/https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsi/article/view/7359.

pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Dalam menghadapi pandemi, pemerintah juga pernah mengeluarkan kebijakan berupa PSBB Transisi sebagai respon dari melandainya kasus Covid-19. Setelah kebijakan PSBB, pemerintah lalu mengganti kebijakan dalam melawan penyebaran pandemi dengan PPKM. Paska kenaikan kasus yang sangat signifikan dan menjadi lonjakan kedua, pemerintah memperketat lagi aktivitas masyarakat melalui kebijakan PPKM level 1 hingga level 4.

Analisis pertama adalah representasi peristiwa dan kelompok yang digambarkan dalam sebuah berita. Representasi yang tampak pada berita ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan PSBB dan PPKM di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Komunikasi Pemerintah tersebut dapat dilihat dari aspek diksi dan pemilihan kata diatur untuk menciptakan kesan baik dan positif atas kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini terbukti pada kalimat kutipan langsung dalam berita dilaman *website covid19.go.id* dibawah ini sebagai berikut:

1) “Seperti berkali-kali disampaikan Presiden, PSBB ini kebijakan paling rasional dari banyak pilihan dan usulan soal percepatan penanganan Covid-19,” ujar Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro.
2) "PSBB transisi didasarkan pada perkembangan penanganan yang sudah lebih baik, tercermin dari menurunnya kasus positif, meningkatnya angka kesembuhan dan angka kematian yang dapat ditekan," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito.
3) "Tahap PSBB transisi masyarakat tetap harus berpedoman pada 3M serta ketentuan lainnya bertujuan memutus mata rantai penularan"

4) "Wilayah diberikan kewenangan dapat melakukan inovasi yang disesuaikan dengan kultur masyarakat dan kondisi masyarakat di wilayahnya dengan tetap berpedoman dengan dasar hukum yang ditetapkan."
5) "Pemerintah kabupaten juga menjunjung tinggi transparansi pemakaian anggaran kegiatan Covid-19, serta pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum secara disiplin terhadap mereka yang masih tidak patuh protokol kesehatan," lanjut Wiku Adisasmito.
6) "Beberapa waktu terakhir, kami mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran. Saya Tegaskan. Tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya Mudik Dilarang. Titik! Saya tegaskan sekali lagi. Mudik dilarang, Titik!," tegas Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo.
7) "Perlu saya tegaskan lagi bahwa mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa dan lurah harus satu visi yang sama, satu strategi yang sama, serta satu cara yang sama dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sekarang ini (Covid-19)," ujar Presiden Joko Widodo

Selain kutipan langsung, didalam penyajian berita laman *website covid19.go.id* juga terdapat kutipan tidak langsung terkait kebijakan PSBB dan PPKM diantaranya yaitu:

1) Dalam hal ini, setidaknya ada dua pertimbangan utama pemerintah dalam menerapkan PSBB, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pertama, untuk menyelamatkan warga negara dari wabah Covid-19. Kemudian yang kedua, pemerintah mempertimbangkan karakteristik bangsa dengan pulau-pulau yang tersebar di penjuru Nusantara.

Hal itu juga menyangkut soal jumlah penduduk atau kondisi demografi dan pertimbangan pemenuhan ekonomi masyarakat.

2) Penularan kasus Covid-19 yang tinggi dalam suatu daerah, juga mencerminkan masyarakat yang masih lengah dan tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat
3) Pemerintah setempat juga diharapkan tidak segan-segan menjatuhkan sanksi jika menemukan adanya pelanggaran

Pada kutipan tersebut, isi berita berusaha menunjukan sisi baik di balik komunikasi pemerintah dalam memutuskan kebijakan PSBB dan kebijakan PPKM, dapat dilihat dari pemilihan kosa kata yang digunakan dalam komunikasi tersebut termasuk kata yang memiliki makna referensial yang baik, seperti penggunaan kata kebijakan paling rasional, menyelamatkan warga Negara, pemenuhan ekonomi, penggunaan perkembangan penanganan yang sudah lebih baik, menurunnya kasus positif, meningkatnya angka kesembuhan, angka kematian yang dapat ditekan, inovasi, transparansi pemakaian anggaran kegiatan Covid-19, Mudik dilarang, Titik, satu visi yang sama, satu strategi yang sama, serta satu cara yang sama.

Secara tak sadar pemerintah membentuk kesan positif terhadap kebijakan PSBB dan PPKM bagi masyarakat melalui komunikasi yang dilakukan. Selain itu, representasi yang berusaha dibentuk adalah pemerintah sebagai pihak yang paling berwenang dan memiliki kekuasaan mutlak bagi masyarakat untuk mematuhi semua kebijakan PSBB dan PPKM dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Representasi lain yang dibentuk dari komunikasi pemerintah tersebut adalah terjadinya peningkatan kasus Covid-19 yang diakibatkan karena kelalaian dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Padahal, kebijakan yang tidak konsisten tersebut yang dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga tidak

dapat menekan kasus Covid-19 secara konsisten dalam waktu yang panjang.

Selama masa pandemi Covid-19 masyarakat sering kali disuguhi dengan berbagai istilah dan kebijakan baru yang berganti-ganti, baik tentang sosialisasi prokes, upaya pencegahan, penanganan pasien, maupun pembatasan sosial. Situasi ini berpotensi membuat masyarakat tidak dapat menangkap dengan jelas apa yang perlu diprioritaskan saat pandemi COVID-19 dan menimbulkan pertentangan di antara mereka. Pemahaman masyarakat mengenai risiko dan penanganan pandemi COVID-19 menjadi kurang utuh sehingga muncul kebingungan. Hal ini berpotensi menimbulkan rasa aman semu[7].

Konsistensi penyampaian gagasan atau pesan dan terminologi merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pejabat pemerintah. Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk memastikan keterjangkauan informasi hingga unit terkecil dalam masyarakat melalui penguatan peran lembaga dan aktor pada berbagai perkumpulan/komunitas dalam masyarakat[8].

Untuk mencegah pendapat atau tindakan yang multitafsir atau bertentangan dengan pesan yang pemerintah sudah rencanakan, komunikasi lintas saluran, aktor, dan tingkat pemerintahan memerlukan koordinasi dan komunikasi yang intensif untuk dapat selaras satu sama lain. Institusionalisasi komunikasi pada masa pandemi COVID-19 memerlukan depolitisasi komunikasi dan pembatasan jumlah institusi/orang yang berwenang menyampaikan pesan[9]. Situasi krisis, seperti pandemi, dapat menghadirkan

---

[7] Fillaili & Ana Rosidha Tamyis, "'Menjaga Persepsi Risiko Masyarakat Melalui Komunikasi Risiko Yang Efektif Pada Masa Pandemi COVID-19'','" *Catatan Kebijakan [Daring]*, 2020.

[8] Hyland-Wood et.al., "Toward Effective Government Communication Strategies in the Era of COVID-19," *Humanities and Social Sciences Communication* 8, no. 30 (2021), https://doi.org/DOI: 10.1057/s41599-020-00701-w.

[9] Ontario Hospital Association, "Effective Communication Strategies for COVID-19," *Research Brief [Daring]*, 2021.

peluang untuk membangun kepercayaan publik kepada pemerintah, tetapi kepercayaan tersebut juga dapat hilang jika aktor yang dipercaya ternyata dianggap sebagai pion politik atau kredibilitasnya diragukan[10].

Komunikasi pemerintah yang dilakukan pada masa pandemi seharusnya dilakukan untuk memberikan informasi positif mengenai pengendalian Covid-19 sehingga dapat mengurangi kecemasan yang terjadi di masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Namun, informasi yang tidak konsisten terkait pandemi Covid-19 dan program pengendaliannya memang sering terjadi sehingga masyarakat cenderung tidak percaya dan abai dengan himbauan dari pemerintah.

Masyarakat menilai Pemerintah belum memiliki perencanaan yang matang dan belum memiliki manajemen komunikasi pemerintah yang mampu meciptakan suasana psikologis yang menenangkan dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19. Hal ini membuktikan bahwa tujuan komunikasi Pemerintah juga belum tercapai dengan optimal dan maksimal. Seperti yang disampaikan oleh Kriyantono bahwa dalam komunikasi krisis terdapat tujuan yaitu mengurangi resiko muncul kepanikan masyarakat, mengurangi kekhawatiran yang dirasakan masyarakat, mengurangi spekulasi-spekulasi khususnya, bersifat dapat dipercaya, keterbukaan, dan komunikasi berbasis keseimbangan kepentingan, didesain untuk meminimalkan kerusakan pada citra pemerintah[11].

Analisis yang kedua adalah relasi, bagaimana hubungan yang terbentuk antara tiga aktor dalam berita tersebut, ketiga aktor tersebut antara lain: penulis sebagai pembuat berita, masyarakat

---

[10] Hyland-Wood et.al., "Toward Effective Government Communication Strategies in the Era of COVID-19."

[11] Kriyantono, *Public Relations & Crisis Management (Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis &Kualitatif)* (Jakarta: Kencana, 2015).

terdampak PSBB dan PPKM, dan narasumber sebagai partisipan publik. Relasi yang ditampilkan oleh penulis kepada para pembaca adalah hadirnya pernyataan Presiden.

Pada awal berita, penulis berita langsung menyuguhkan kutipan pendapat Presiden Joko Widodo dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19. Pendapat yang bertentangan dengan isu yang telah beredar luas di masyarakat sebagai akibat negatif dari penetapan PSBB. Mayoritas masyarakat mengeluhkan dampak yang dialami seperti sulitnya ekonomi karena tidak dapat bekerja seperti biasa sehingga segala kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi dengan baik khususnya masyarakat kelas bawah. Fisik yang menurun akibat ruang gerak yang dibatasi serta efek psikologis akibat perasaan khawatir yang berlebihan terhadap virus Covid-19[12].

Disisi lain banyak media massa yang menyoroti dampak dari kebijakan PSBB tersebut. Bidang yang sangat jelas terlihat terkena imbasnya dari penerapan kebijakan PPKM ini adalah bidang ekonomi. Bahkan bisa dikatakan bahwa lebih separuh aktivitas di bidang ekonomi terhenti karena pandemi Covid-19 ini. Dunia ekonomi dan bisnis saat ini benar-benar menghadapi masa-masa sulit dimana perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa bangkit kembali. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang semakin sulit dengan berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi yang tentunya sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat itu sendiri.

Secara otomatis msyarakat akan memprioritaskan makanan dan kebutuhan pokok lainnya, sedangkan untuk kebutuhan sekunder dan tersier akan ditunda terlebih dahulu, maka dari itu aktivitas

[12] Wibowo Hadiwardoyo, "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat PSBB," *Jurnal of Business and Entrepreneurship 2* 2 (2020): 90.

menabung akan menurun tajam. Demikian pula untuk pembiayaan dan jasa keuangan. Implementasi kebijakan PPKM teryata kurang efektif karena masyarakat merasa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah belum dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah untuk mampu memenuhi kebutuhannya[13].

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa sekitar 2.084.593 pekerja secara nasional mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Dari total tersebut, sebanyak 1.546.208 orang bekerja di sektor formal dan 538.385 di sektor informal. Menurut Kementerian Tenaga Kerja, sekitar 85 persen pekerja dirumahkan karena kantor/perusahaan mereka tidak beroperasi akibat penerapan PSBB oleh pemerintah setempat. Mayoritas pekerja tersebut bekerja di dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pariwisata, transportasi, dan manufaktur. Selain itu, kebijakan karantina wilayah/lockdown di negara lain juga ternyata memengaruhi berbagai unit usaha di Indonesia karena berbagai perusahan tersebut kesulitan mengimpor bahan baku produksi dan mengekspor hasil produksi ke berbagai negara lain[14].

Sedangkan penulis berita dalam portal www.covid19.go.id menggunakan aspek sudut pandang pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan kutipan-kutipannya disusun dengan kalimat ujaran langsung atau tidak langsung sehingga menunjukan bahwa PSBB adalah kebijakan yang paling sesuai untuk masyarakat Indonesia, seperti dalam kutipan langsung berikut: “PSBB ini kebijakan

[13] Ahmad Fhatoni, “Dampak Covid 19 Dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM Di Wiyung Surabaya. Oleh Ahmad Fhatoni. Jurnal Prodi Ekonomi Syariah” 3, no. 2 (2020).
[14] Kompas, “Dampak Corona, Bisnis Transportasi Merugi Dan Beralih Fungsi. Kompas TV.,” 2020.

paling rasional dari banyak pilihan dan usulan soal percepatan penanganan Covid-19".

Kalimat tersebut berusaha mengklarifikasi fakta-fakta yang telah beredar di masyarakat dengan beberapa dalil yang dihadirkan Pemerintah. Pemerintah mencoba untuk membangun citra positif ditengah banyaknya komentar negatif atas keputusan PSBB. Pada judul berita (1), berusaha untuk memberikan kesan yang baik dibalik keputusan PSBB tersebut, dengan penggunaan kata paling rasional.

Analisis yang ketiga adalah identitas. Identitas ini mengacu pada posisi dan keberpihakan penulis berita dalam menampilkan berita komunikasi pemerintah dalam pengendalian Covid-19. Identitas yang ditampilkan pada berita ini adalah penulis berusaha menguak fakta-fakta baru dengan menghadirkan seorang narasumber. Berdasarkan pendapat tersebut, penulis menunjukkan keberpihakannya pada Pemerintah, penulis berusaha menunjukan sisi baik dari segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui pernyataan Presiden Joko Widodo dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19. Hal tersebut tampak pada kutipan-kutipan narasumber yang bersifat langsung berikut:

"Seperti berkali-kali disampaikan Presiden, PSBB ini kebijakan paling rasional dari banyak pilihan dan usulan soal percepatan penanganan Covid-19"

Pada data ini juga menguak analisis identitas yang mengacu pada posisi dan keberpihakan penulis dalam menampilkan berita, dengan ungkapan eufemistik yang dilontarkan Jokowi dengan keterangan paling rasional. Kata paling rasional memiliki pengertian merupakan cara terbaik yang dapat ditempuh atau keputusan final yang terbaik, terlihat keberpihakan penulis pada keputusan Jokowi menetapkan kebijakan PSBB.

Pemerintah juga terkesan hanya menyalahkan masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan sehingga kasus Covid-19 meningkat seperti dalam kutipan tidak langsung Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito berikut:

1. "Penularan kasus Covid-19 yang tinggi dalam suatu daerah, juga mencerminkan masyarakat yang masih lengah dan tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat."
2. "Pemerintah setempat juga diharapkan tidak segan-segan menjatuhkan sanksi jika menemukan adanya pelanggaran"

Penggunaan kata "masih lengah" diidentifikasi sebagai wacana yang telah terjadi dimasyarakat. Pemilihan kata tersebut diartikan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya mengendalian pandemi Covid-19, namun masih terjadi lonjakan kasus akibat ketidakpatuhan masyarakat. Kata "menjatuhkan sanksi" merepresentasikan suatu kekuasaan mutlak dari pemerintah. Komunikasi Pemerintah tersebut membangun narasi menyalahkan masyarakat atas tingginya angka penderita Covid-19. Perilaku masyarakat dinilai menjadi penyebab naiknya penderita Covid-19 secara signifikan. Kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat ini memang tidak mudah untuk dijalankan, terlebih bagi masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal[15]. Persoalan ekonomi dan menurunnya pendapatan masyarakat menjadi permasalahan utama atas kebijakan tersebut.

Kebijakan PSBB dan PPKM ini juga direspon oleh Majelis Ulama Indonesia, karena menjadi titik awal berubahnya aktivitas keagamaan pada umat beragama. Dalil-dalil *rukhsah* (pengecualian) dalam teks-teks keagamaan masyarakat Muslim pada saat wabah bermunculan. Kebijakan PPKM dimasa pandemi

[15] Rahma Ainun Mardiyah dan R Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran Di Indonesia," *Universitas Padjadjaran*, 2020, 19.

ini memaksa masyarakat untuk mengambil pilihan rukhsah (pengecualian), tak terkecuali umat Islam.

Banyak tatanan ibadah yang berubah teknisnya. Misal; shalat berjamaah yang dalam aturannya merapatkan dan meluruskan shaf (barisan), dipaksa oleh Covid-19 harus menjaga jarak agar tidak bersentuhan fisik secara langsung. Begitu juga aktivitas keagamaan seperti bimbingan dan kepenyuluhan agama, model tatap muka secara langsung dalam sebuah majelis, diubah secara *offline*, dengan mengunakan instrumen teknologi, yaitu daring (dalam jaringan). Ibadah di Mesjid, Gereja, Wihara, Pura, Klenteng juga diberi batas jarak antara satu jamaah dengan jamah yang lain, bahkan beberapa bulan awal pandemi, umat beragama di larang untuk ibadah di rumah ibadat. Mereka disarankan untuk ibadah di rumah masing-masing.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum untuk shalat berjamaah boleh dilakukan dengan merenggangkan saf demi menjaga jarak. MUI juga menyebutkan bahwa ketika shalat mengenakan masker yang menutup mulut dan hidung adalah boleh dan sah. Seperti yang tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.

Berikut arti Hadis yang menerangkan adanya kemudahan dalam beribadah saat kondisi darurat atau keadaan sulit, di anataranya:

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah suka untuk dilakukan rukhsah-Nya, sebagaimana Allah membenci apabila maksiat dilakukan.” (HR. Ahmad).

Dalam Fatwa MUI, dijelaskan bahwa Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu

merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams). Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

MUI mengeluarkan fatwa Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 sebagai bentuk respon terhadap kebijakan pemerintah dalam pengendalian Covid-19. Dalam melakukan proses komunikasi terhadap Fatwa nomor 14 tahun 2020 kepada masyarakat, MUI melakukan beberapa pendekatan, baik hal tersebut bersifat konvensional maupun virtual melalui beberapa media baru dan media daring salah satunya melalui laman situs *www.covid19.go.id*.

Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 sebagai bentuk komunikasi edukasi kepada masyarakat agar dapat menerapkan protokol kesehatan sebagaimana telah dianjurkan pemerintah untuk kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh juru bicara Prof Wiku berikut:

"Pada prinsipnya, berbagai kebijakan yang ditetapkan ini bukan untuk mempersulit masyarakat, namun semata-mata demi keselamatan dan kesehatan kita bersama. Kita harus mampu mengalahkan keegoan kita sejenak, demi menuai hasil yang signifikan dan pada akhirnya dapat berdaptasi, sehingga dapat hidup produktif dan aman Covid-19".

Penggunaan kalimat bukan untuk mempersulit masyarakat, demi keselamatan, kesehatan, dan mengelahkan keegoan menunjukan bahwa segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan kebijakan yang mutlak dan tidak bisa di hindarkan lagi demi kebaikan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo berikut: "Penerapan PPKM Darurat yang dimulai 3 Juli 2021 adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari meskipun itu sangat berat".

Dalam hal ini menujukan MUI juga mendukung segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

b. Komunikasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pakai masker dan penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun

Presiden Indonesia menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 melalui keputusan Presiden No. 11 tahun 2020. Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 menyampaikan bahwa pertahanan terdepan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 diantaranya adalah memakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Berdasarkan surat edaran kementerian kesehatan No. HK.02.02/I/385/2020 menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk melaksanakan gerakan pakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Dengan adanya surat edaran tersebut, presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk memastikan ketersediaan masker yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Analisis representasi yang tampak pada berita ini adalah kebijakan pakai masker dan penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang diambil oleh Pemerintah di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Aspek diksi diatur untuk menciptakan kesan positif atas kebijakan tersebut meskipun masyarakat dan media massa lain sedang menyoroti kenaikan dan kelangkaan

masker serta handsanitizer di masyarakat. Hal ini dibuktikan pada kalimat kutipan langsung dibawah ini sebagai berikut:

“Saya meminta agar penyiapan masker sekarang ini betul-betul disiapkan dan diberikan kepada masyarakat karena kita ingin setiap warga yang harus keluar rumah itu wajib memakai masker,”

Pada kutipan diatas, komunikasi pemerintah terkesan berusaha memunculkan sisi baik upaya pemerintah dalam pengendalian Covid-19 yang tercermin dari pemilihan kosa kata yang memiliki makna referensial yang baik, seperti penggunaan kata disiapkan dan diberikan yang membentuk kesan positif dari komunikasi pemerintah. Pemilihan kata tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah menyediakan dan memberikan masker yang cukup untuk masyarakat.

Selain itu, kesan positif juga ditunjukan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto juga menyampaikan regulasi penggunaan masker bahwa masyarakat disarankan untuk menggunakan masker kain yang dapat di cuci dan dikenakan berkali-kali, masker medis dan N-95 diprioritaskan bagi dokter dan paramedis untuk meningkatkan efektivitas pemakaian masker. Kesan positif lain yang berusaha di ciptakan melalui komunikasi pemerintah juga terlihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo berikut:“Nanti Pak Menteri biar cek. Tapi dari informasi yang saya terima, stok yang di dalam negeri kurang lebih 50 juta masker ada, cukup untuk warga".

Di saat masyarakat kesulitan mendapatkan masker disertai tingginya harga masker, Presiden Joko Widodo justru sempat mengklaim ketersediaan masker dalam negeri masih aman. Pemilihan kata yang digunakan Presiden berusaha menunjukan bahwa Pemerintah masih mampu mengendalikan persediaan masker, walaupun pada saat yang bersamaan stok masker dimasyarakat terjadi kelangkaan akibat banyaknya orang yang

membutuhkan masker dan handsanitizer, sehingga perusahaan serta orang yang memperjualkan barang-barang tersebut menaikkan harganya, yang awalnya harga masker 1 box hanya berkisaran 25.000- 35.000 ribu tergantung merk dan naik hingga 200.000 ribu bahkan lebih. Harga handsanitizer yang awalnya hanya berkisaran sekitar 24.000 ribu bisa naik menjadi 46.000 bahkan lebih tergantung ukuran dan merk.

Ketidaksesuaian informasi yang disampaikan menunjukkan pemerintah belum memberikan informasi secara transparan kepada publik, padahal menurut Drottz-Sjoberg & Britt-Marie, model komunikasi pemerintah dalam penanganan bencana dibutuhkan adanya *truth-objective world, legitimacy-social world, auhtenticty-inner world* yaitu apa yang disampaikan adalah benar, teoritis ilmiah, sah, praktis, normatif sosial dan disampaikan dengan jujur berbasis pada keyakinan, emansipatoris, individu dan kelompok[16]. Coombs juga menjelaskan bahwa dalam kondisi krisis komunikasi pemerintah harus dilakukan secara cepat atau segera, konsisten, dan terbuka[17]. Selain itu pemerintah juga harus menekankan pentingnya menggunakan data dan analisis dalam berkomunikasi[18].

Analisis yang kedua adalah relasi penulis sebagai pembuat berita, masyarakat, dan narasumber sebagai partisipan publik. Relasi yang ditampilkan oleh penulis kepada para pembaca adalah hadirnya pernyataan Presiden yang menginstruksikan jajarannya untuk memastikan ketersediaan masker yang dapat digunakan oleh masyarakat. Penulis berita menggunakan aspek sudut pandang Pemerintah melalui Presiden yang disusun dengan kalimat ujaran langsung dan tidak langsung tersebut.

---

[16] Sulistyowati F, "Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan COVID-19 Pada Majalah TEMPO Edisi Maret-Juli 2020."

[17] Coombs, *Parameters for Crisis Communication. In W.T. Coombs & S.J. Holladay (Eds.), The Handbook of Crisis Communication "Edisi Terjemahan"* (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010).

[18] Lambert dan Loiselle (2007) dalam Stephens Keri, *New Media in Times of Crisis* (Routledge, New York, 2019).

Dari ujaran langsung yang disampaikan Presiden menunjukan identitas yang ditampilkan pada berita ini adalah keberpihakannya pada Pemerintah, penulis berusaha menunjukan sisi baik dari segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui pernyataan Presiden Joko Widodo dan Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional. Hal-hal itu tampak pada kutipan-kutipan narasumber yang bersifat langsung berikut:

"Angka lebih rendah lagi di populasi pedesaan. Maka mari jadikan gerakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir gerakan melawan COVID-19, sekaligus membangun sarana kesehatan untuk kepentingan semua orang."

Secara tidak langsung, penggunaan kata "membangun" menunjukan peran serta pemerintah dalam penanganan Covid-19 juga berdampak pada pembangunan infrastruktur kesehatan untuk masyarakat yang lebih baik. Program penanganan pandemi Covid-19 dengan memakai masker dan cuci tangan juga didukung oleh MUI dengan fatwanya Nomor 14 tahun 2020 MUI menyebutkan bahwa ketika shalat mengenakan masker yang menutup mulut dan hidung adalah boleh dan sah[19]. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan pemerintah tidak melanggar aturan-aturan beragama

c. Komunikasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan tes *polymerase chain reaction* (PCR)

Menindaklanjuti keputusan tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR sebesar Rp 495 ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta Rp 525 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali, pemerintah memastikan kebijakan tersebut diterapkan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia.Batas tarif RT-PCR yang baru ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/2845/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR.

[19] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19," 2020.

Batas tarif tertinggi itu berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri. Batas tarif tertinggi tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah, atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19.

Analisis representasi yang tampak pada berita ini adalah kebijakan tes PCR. Aspek diksi dalam komunikasi pemerintah diatur untuk menciptakan kesan positif. Hal ini terbukti pada kalimat kutipan langsung dan tidak langsung dibawah ini sebagai berikut:

1. “Dimohon Masyarakat dapat menindaklanjuti perubahan harga ini secara bertanggungjawab dan mobilitas tidak dilarang namun sebaiknya dikendalikan sesuai tingkat kepentingan atau urgensinya” ujar Prof Wiku Adisasmito
2. “Namun, terlepas dari rincian biaya tersebut, pemerintah berkomitmen, untuk membuat harga testing PCR sebagai metode gold standar yang semakin terjangkau”
3. Lebih lanjut, kami harapkan partisipasi aktif masyarakat sebagai pengguna, untuk ikut mengawasi penerapan batas tarif harga PCR yang baru. Warga dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum jika menemukan pelanggaran,” ujar Menteri Johnny.

Pada kutipan diatas, komunikasi pemerintah memilih menggunakan kosa kata yang memiliki makna referensial positif, seperti penggunaan kata menindaklanjuti perubahan harga, mobilitas tidak dilarang, pemerintah berkomitmen, terjangkau, partisipasi aktif masyarakat, warga dapat melaporkan.

Komunikasi pemerintah tersebut membentuk kesan positif terhadap kebijakan penetapan harga tes PCR. Padahal, perubahan-

perubahan kebijakan tentang tes PCR yang dilakukan oleh pemerintah justru menimbulkan kebingungan dan pertanyaan publik. Perubahan yang cepat itu dianggap telah mengindikasikan kebijakan dibuat atas adanya pengaruh kepentingan kelompok demi mendapatkan keuntungan. Kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat yang hendak ke daerah PPKM level 3 dan 4 berlaku mulai 24 Oktober 2021.

Hal itu diberlakukan setelah dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2 dan Level 1 COVID-19 di Wilayah Jawa Bali tertanggal 23 Oktober 2021. Aturan bahwa penumpang pesawat wajib menunjukkan hasil tes PCR maksimal dua hari atau 2X24 jam sebelum pemberangkatan itu juga tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19. Aturan itu kemudian mendapatkan kritik keras dari publik termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tingginya harga PCR saat itu yang yang mencapai Rp495 ribu di Jawa Bali dan Rp525 ribu di daerah lain dinilai sangat memberatkan bagi masyarakat.

Pada 27 Oktober 2021, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan kemudian menurunkan batas harga tertinggi tes PCR menjadi Rp275 ribu di Jawa Bali dan Rp300 ribu di daerah lain. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir saat itu mengatakan penurunan harga ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sejumlah komponen biaya PCR telah mengalami penurunan. Pada 28 Oktober 2021, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Perubahan Instruksi terkait perubahan

aturan masa berlaku tes PCR menjadi 3x24 jam untuk syarat penumpang pesawat.

Perubahan aturan itu tertuang dalam Inmendagri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2 dan 1 di Wilayah Jawa dan Bali. Inmendagri itu diikuti dengan keluarnya SE Nomor SE 90 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 86 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi COVID-19. Dalam aturan itu pelaku perjalanan jarak jauh selain menggunakan pesawat udara juga diwajibkan menunjukkan tes PCR atau antigen.

Komunikasi yang dilakukan pemerintah berusaha mengklarifikasi fakta-fakta yang telah beredar di masyarakat dengan beberapa dalil yang dihadirkan Pemerintah. Kata "namun" merupakan sebuah negasi dalam kalimat. Menurut Eriyanto, kalimat negasi sering digunakan untuk tujuan polemik[20].

Analisis relasi yang ditampilkan oleh penulis kepada para pembaca adalah hadirnya pernyataan Prof Wiku Adisasmito dan Menteri Johnny. Pendapat yang menunjukan kebijakan tentang tes PCR. Penulis berita menggunakan aspek sudut pandang pemerintah melalui kutipan-kutipannya yang disusun dengan kalimat ujaran langsung dan tidak langsung.

Analisis identitas yang ditampilkan pada berita ini adalah penulis berusaha menguak fakta-fakta baru dengan menunjukkan keberpihakannya pada kebijakan Pemerintah, penulis berusaha menunjukan sisi positif dari segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal-hal itu tampak pada kutipan-kutipan narasumber yang bersifat langsung berikut:

[20] Eriyanto, "Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media (N. Huda (2001.); VII)."

1. “Penyesuaian ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan tes PCR. Semakin banyak yang melakukan tes, maka semakin cepat penularan virus dapat ditekan. Sehingga, semakin optimal pula penanganan COVID-19” tutur Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate
2. “Pemerintah sebagai pengambil kebijakan tidak bisa bekerja sendirian”

Strategi komunikasi pemerintah yang dilakukan dalam penangan pandemi Covid-19 adalah harus dengan komunikasi yang efektif, partisipatif, akurat dan membangun kepercayaan yang berbasis pada ilmu pengetahuan/sains dan data sains guna membangkitkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan gerakan nasional disiplin protokol kesehatan. Sehingga, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan efektif, cepat, tepat serta berkualitas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19 dapat meningkat.

Dengan komunikasi yang efektif dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan informasi dan edukasi tentang pengendalian pandemic covid-19, diharapkan akan meningkatkan *awareness* dan disiplin publik terhadap protokol kesehatan, masyarakat mampu memilah informasi, gagasan, isu yang didapat tentang Covid-19, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tujuan strategi komunikasi pemerintah yang dilakukan dalam pengendalian pandemi Covid-19 adalah komunikasi *behavioural change* melalui komunikasi publik yang sistematis, komprehensif dan masif untuk menghantikan penyebaran pandemi Covid-19. Selain itu juga diharapkan adanya kolaborasi antara pemerintah, media, dunia usaha akemisi dan komunitas yang sinergis.

d. Komunikasi Pemerintah Dalam Menetapkan Kebijakan Vaksinasi

Menurut Lewis komunikasi ke bawah adalah untuk menyampaikan tujuan, merubah sikap, membentuk pendapat, mengurangi ketakutan dan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi dan mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Sebagai keberhasilan pemerintah terkait program yang akan dijalankan perlu melibatkan partisipasi dari masyarakat. Untuk itu, perlu kiranya cara yang tepat dalam berkomunikasi khususnya terkait dengan program vaksinasi Covid-19[21].

Sebagaimana diketahui program vaksinasi ini masih menimbulkan pro dan kontra ada masyarakat yang bersedia mengikuti vaksin namun ada juga sebagian masyarakat yang belum bersedia divaksin dengan berbagai alasan mulai dari alasan riwayat kesehatan, ibu hamil dan ibu menyusui hingga alasan pribadi. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di laman covid19.go.id mengatakan, hal ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa informasi keliru yang beredar di masyarakat terkait vaksin, seperti halal-haram vaksin, kandungan berbahaya dalam vaksin, efektivitas serta keamanan vaksin, dan lain sebagainya.

Bahkan, Presiden Joko Widodo serius mengaktualisasikan apa yang oleh Kouzes & Posner disebut dengan istilah "*exemplary leadership*", yakni menjadi pemimpin yang patut diteladani karena beliau telah memberikan contoh menjadi orang pertama yang bersedia mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman dan halal[22].

---

[21] Muhamad Arni, *Komunikasi Organisasi*.

[22] Kouzes J. M & Posner B. Z., *Leadership the Challenge. Alih Bahasa: Reviyani Sjahrial* (Jakarta: Erlangga, 2004).

Atas adanya hambatan keragu-raguan terhadap vaksinasi Covid-19, dinamika vaksinasi ini berlanjut pada upaya untuk mematahkan keraguan dilakukan untuk kepentingan menjaga dan mempertahankan kesehatan global di tengah krisis saat ini akibat pandemi yang sedang berlangsung. Di antara berbagai upaya untuk mengatasi keraguan vaksin dan menumbuhkan kepercayaan vaksinasi, strategi komunikasi dilalukan dengan melihat peluang untuk mempertimbangkan peran emosi dalam upaya komunikasi[23].

Representasi yang tampak berupa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan vaksinasi. Komunikasi Pemerintah dilihat dari aspek diksi dan pemilihan kata diatur untuk menciptakan kesan positif program vaksinasi. Hal ini terbukti pada kalimat kutipan langsung dalam berita dilaman *website covid19.go.id* dibawah ini sebagai berikut:

1. “Kami telah menerima rekomendasi dari WHO (World Health Organization), bahwa nilai efikasi diatas 50 persen dapat diterima. Dan kita tahu, jika angka lebih rendah, tentunya orang yang akan divaksinasi akan lebih banyak jumlahnya. Dan itu saya kira adalah tantangan untuk berbagai negara di dunia termasuk Indonesia," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito.
2. “Menindaklanjuti kebijakan vaksin Covid-19 gratis yang diumumkan Presiden pada tanggal 16 Desember lalu, dapat kami tegaskan bahwa vaksin Covid-19 gratis untuk masyarakat, tanpa persyaratan apapun, juga tanpa persyaratan keanggotaan dan keaktifan di BPJS Kesehatan” ujar **Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid**
3. “Program vaksinasi Covid-19 adalah prioritas pemerintah yang akan dilaksanakan secara bertahap setelah dikeluarkannya izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan

[23] Kouzes J. M & Posner B. Z.

POM) dan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, serta seiring dengan ketersediaan vaksin. Kemenkes akan memastikan kesiapan semua fasilitas pelayanan Kesehatan, tenaga Kesehatan dan sistem distribusi untuk pelaksanaan vaksinasi", terang Dr. Siti Nadia.

4. "Sesuai arahan bapak Presiden terkait penyediaan vaksin Covid-19 bahwa seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat, serta efektivitas vaksin termasuk tahapan uji klinik fase III, sebagai otoritas pengawas obat dan makanan di Indonesia, Badan POM berkewajiban mengawal ketat keamanan khasiat dan mutu vaksin Covid-19, sebelum dan selama digunakan dalam program vaksinasi nantinya."
5. "Kami menghimbau masyarakat untuk memberikan dukungan bagi program vaksinasi ini. Jangan kendor menjalankan disiplin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan siap divaksinasi saat vaksin siap. Bersama-sama kita bangun kekebalan kelompok untuk melindungi diri, melindungi negeri, dan mengakhiri pandemi", ujar Dr. Siti Nadia Tarmizi.

Pada kutipan tersebut, isi berita berusaha meyakinkan masyarakat di balik komunikasi pemerintah dalam memutuskan kebijakan vaksinasi dapat dilihat dari pemilihan kosa kata yang digunakan dalam komunikasi tersebut termasuk kata yang memiliki makna referensial yang baik, seperti penggunaan kata vaksin Covid-19 gratis, prioritas pemerintah, rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan menjamin keselamatan masyarakat.

Selain satgas penanaganan Covid-19, MUI juga ikut merespon kebijakan vaksinasi pemerintah. Keberadaan MUI selama masa pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan umat Islam Indonesia. Bahkan fatwa MUI menjadi rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk mengutamakan keselamatan rakyat.

Dalam soal vaksin, peran MUI pun juga penting bagi umat Islam. Wakil Presiden Ma'aruf Amin yang juga menjabat Ketua MUI menjelaskan bahwa lembaga itu sudah dilibatkan pemerintah sejak awal pandemi di Indonesia. MUI sendiri sudah melaksanakan peranannya dalam pandemi Covid-19 di Indonesia sejak lama. Berikut kalimat kutipan langsung dalam berita dilaman *website covid19.go.id* dibawah ini:

1. "Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Kemudian juga terus mensosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi," ujarnya.
2. "Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia"
3. "Meskipun sudah halal dan suci, namun fatwa MUI secara utuh masih menunggu keputusan BPOM terkait keamanan (*safety*), kualitas (*quality*), dan kemanjuran (*efficacy*)" kata Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh

Pemerintah telah memastikan hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai rekomendasi WHO vaksin Covid-19 produksi sinovac dijamin suci dan halal. Seperti Fatwa MUI Pusat pada tanggal 8 Januari 2021, menetapkan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac, yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT. Bio Farma adalah suci dan halal. Kata "suci dan halal" menunjukan bahwa MUI berusaha meyakinan masyarakat yang masih meragukan vaksin produksi Sinovac yang akan digunakan pemerintah dalam program vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia. MUI menunjukan dukungannya terhadap vaksin yang disediakan pemerintah merupakan vaksin

terbaik. Pemilihan kata dalam komunikasi tersebut menunjukan citra baik dan dukungan MUI dari program vaksinasi yang dilakukan pemerintah.

Bila dianalisis berdasarkan relasi wacana maka diperoleh gambaran bahwa relasi komunikasi pemerintah tersebut menjelaskan kalau Presiden dan MUI sangat mendukung dilaksanakannya vaksinasi di Indonesia bahkan Jokowi berkomitmen kalau Indonesia akan mendapatkan 20 Juta –30 Juta vaksin pada 2020. Untuk wacana Identitas dalam penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana identitas wartawan, khalayak, dan Identitas partisipan dalam berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks, sebagai bentuk analisis pada analisis wacana kritis Norman Fairclough, sehingga semakin jelas pemetaan media tersebut dalam memberitakan pemberitaan Vaksin Covid-19, dimana www.covid19.go.id sebagai media online nasional tentu memiliki kepentingan dalam pemberitaanya mencoba memberikan identitas bahwa media tersebut selalu menginformasikan segala kebijakan yang dikeluarkan pemeritah dari sudut pandang pemerintah. Analisis identitas yang ditampilkan pada berita ini adalah penulis berusaha menunjukkan keberpihakannya kepada Pemerintah dengan menunjukan pernyataan baik pemerintah maupun MUI sebagai penguat dengan mengeluarkan fatwa.

2. *Discourse Practice* (Ideologi Penciptaan Teks) dalam Wacana Komunikasi Pemerintah dalam Pengendalian Covid-19

Alat kedua yang digunakan Fairclough adalah *Discourse Practice* atau analisis messostruktural[24]. *Discourse practice* menggambarkan tentang ideologi penciptaan teks. Pada dasarnya ideologi penciptaan teks dapat dilihat melalui produksi teks dan konsumsi teks oleh

[24] Maghvira G, "Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Tempo.Co Tentang Kematian Taruna STIP Jakarta," *Jurnal The Messenger* 9, no. 2 (2017): 120–30.

masyarakat terhadap isu dan wacana komunikasi pemerintah dalam pengendalian Covid-19. Dalam analisis praktik produksi teks atau dimensi meso interpretasi dilakukan terhadap pemrosesan wacana, seperti proses penyebaran dan penggunaan wacana, profil media, prosedur editor, dan cara pekerja memproduksi teks berita[25].

Melalui pilihan kata yang digunakan pada proses penulisan, terlihat keberpihakan produksi teks tersebut condong terhadap Kebijakan Pemerintah. Produksi berita yang dilakukan www.covid19.go.id berisi komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan pengendalian Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Website www.covid19.go.id dikelola oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibentuk 13 Maret 2020 dengan adanya Keppres No. 7 tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19. Prmbrntukan gugus tugas ini merupakan langkah strategis penanganan Covid-19 di Indonesia.

Distribusi berita pada media ini dapat dikatakan mudah karena covid19.go.id dapat diakses secara daring tanpa melakukan langganan premium yang berbayar. Didalam laman www.covid19.go.id juga menyediakan daftar situs resmi covid-19 Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berita-berita yang diproduksi oleh www.covid19.go.id ditulis oleh Satuan Tugas Penanganan covid-19 sehingga berisi kebijakan pemerintah dalam pengendalian covid-19. Data yang menjadi objek kajian pada penelitian ini merupakan penggalan berita tentang kebijakan PSBB dan PPKM, kebijakan memakai masker dan cuci tangan, kebijakan PCR serta vaksinasi.

Pengemasan berita media www.covid19.go.id yang menarik dan aktual terkait kebijakan pemerintah dalam pengendalian Covid-19 menggunakan bahasa jurnalistik yang sesuai kaedah penulisan. Pada berita tentang kebijakan pemerintah tentang PSBB, PPKM, pemakaian masker, cuci tangan, PCR, serta vaksinasi penulis ingin menyampaikan

[25] Eriyanto, "Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media (N. Huda (2001); VII)."

agar pembaca fokus pada program Pemerintah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta menilai kinerja baik/buruknya kinerja pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang diambil saat pandemi. Dan mengandung maksud penegasan bahwa Pemerintah memiliki hak prerogatif dalam mengambil keputusan. Dalam penulisan berita ini, penulis berita banyak mengutip komunikasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19. Penulis ingin menunjukan bahwa pemerintah yang memiliki kekuasaan penuh dalam pengendalian Covid-19.

Selain kebijkan yang dikeluarkan sendiri oleh pemerintah, laman situs www.covid19.go.id juga menampilkan kebijakan MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas fatwa di Indonesia selama dua tahun ini telah secara aktif terlibat menanggulangi penyebaran virus Covid-19, baik secara langsung maupun tidak. Selain peran strategis MUI dalam melakukan aksi-aksi di lapangan. MUI juga menerbitkan fatwa-fatwa keagaman sejak awal pandemi yang tentu saja menjadi rujukan utama bagi pemerintah dan masyarakat di Indonesia. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 yang memberikan aturan mekanisme ibadah di masa pandemi Covid-19 misalnya. Dalam fatwa itu MUI menjelaskan beberapa hal yang ditunjukan melalui isi fatwa sebagai berikut:

1. Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan import barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency.
2. Umat Islam wajib mendukung dan mentaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah

Selain itu Pemerintah melalui Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito juga mengeluarkan pernyataan langsung berikut: "Oleh karena itu, umat Islam wajib untuk

berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional, yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan kekebalan komunitas dan juga sebagai bentuk ikhtiar untuk melindungi diri dan terbebas dari Covid-19".

Kebijakan MUI mengeluarkan fatwa dan penggunaan kata "wajib" dalam komunikasi pemerintah menunjukan kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam program penanganan Covid-19. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi Tabyun dan Tawjih. Tabyun adalah menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. Adapun Tawjih adalah memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer[26].

Kata wajib dalam islam merupakan suatu perkara yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan, dan jika umat muslim meninggalkannya maka berdosa[27]. Sedangkan dalam atuan pemrintahan kata wajib mengandung makna bahwa pemerintah dapat memaksa warga negara untuk ikut dalam kebijakan pemerintah[28], dalam hal ini pengendalian pandemi Covid-19.

3. *Socio-cultural Practice* (Penciptaan teks) dalam Wacana Komunikasi Pemerintah dalam Pengendalian Covid-19

Dimensi *socio-cultural practice* atau makrostruktural merupakan praktik sosial penciptaan teks atau istilah wacana penanganan covid-19. Praktik sosial dapat dilihat dari konteks sosial, budaya dan sejarahnya[29]. Analisis tingkat makrostruktural yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang ada di luar media sesungguhnya memengaruhi bagaimana sebuah wacana ada dalam media. Praktik

[26] Erfan Riadi., "'Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)'" 6 (2010).
[27] Anshori dan Ghafur, *Hukum Islam; Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008).
[28] Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).
[29] Eriyanto, "Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media (N. Huda (Ed.); VII)."

sosial-budaya, seperti tingkat situasional, institusional, dan sosial memengaruhi institusi media dan wacananya. Tingkat situasional, berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya. Tingkat institusional, berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal maupun eksternal. Tingkat sosial, berkaitan dengan situasi yang lebih makro, seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya masyarakat. Analisis ini terbagi menjadi tiga level: level situasional, institusional, dan sosial[30]. Berikut adalah hasil analisis masing-masing levelnya.

a. Level Situasional

Kemunculan istilah wacana dalam penanganan covid-19 karena penyebaran covid-19 di Indonesia semakin masif. Istilah wacana tersebut sebagian telah menjadi kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini di tingkat daerah hingga pusat, seperti PSBB, PPKM, penggunaan masker dan cuci tangan, penetapan tarif PCR dan vaksinasi.

Wacana tersebut ada yang menuai resistensi dari masyarakat karena dianggap bukan solusi yang efektif saat ini. Oleh karena itu, implementasi penanganan Covid-19 harus dilakukan dengan baik karena data yang dimuat dalam laman satgas.covid-19 peta sabaran covid-19. Berdasarkan data di atas, kebijakan utama yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini mencakup PSBB, PPKM, penggunaan masker dan cuci tangan, penetapan tarif PCR dan vaksinasi. Penerapan kebijakan tersebut dilandasi pertimbangan ekonomi.

b. Level Institusional

Teks berita tersebut diterbitkan oleh www.covid19.go.id. *website* tersebut merupakan milik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai sumber informasi resmi penanggulangan virus Covid-19. Situs ini diharapkan bisa menjadi

[30] Eriyanto.

rujukan resmi untuk informasi satu pintu mengenai virus corona dan bagaimana mengendalikannya. Situs ini bertujuan untuk memastikan publik mendapatkan akses pada informasi resmi dan akurat mengenai penanggulangan wabah Covid19 di Indonesia.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Doni Monardo menjelaskan situasi darurat global akibat pandemi Covid-19 membuat banyak informasi yang beredar di masyarakat tak semuanya akurat. Situs www.covid19.go.id memuat pesan tentang 3 langkah penting untuk dilakukan masyarakat yaitu cara mengurangi risiko penularan, cari informasi yang benar dan apa yang perlu dilakukan bila sakit. Data statistik mengenai jumlah kasus positif Covid-19 diperbarui secara real-time dan diharapkan menjadi acuan untuk berbagai pihak, terutama media dalam pemberitaan mereka.

Peluncuran website covid19.go.id kemudian diikuti dengan peluncuran akun-akun media sosial milik gugus tugas Covid pada platform Twitter, Facebook dan Instagram. Website dan akun-akun media sosial tersebut selalu diperbaharui dengan berita terbarui mengenai perkembangan penanggulangan Covid-19 dan berita-berita keputusan yang diambil termasuk kampanye-kampanye sosial terkait penanganan Covid-19, mengkampanyekan hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam ikut serta mengurangi penyebaran virus.

Dalam melaksanakan komunikasi dengan masyarakat, gugus tugas sering kali menggunakan influencer dari tokoh-tokoh masyarakat, artis, ulama serta tokoh-tokoh terkenal untuk membantu mengkampanyekan dan mengkomunikasikan program-program dan himbauan gugus tugas maupun pemerintah. Bahkan akun media sosial Presiden Jokowi juga selalu mengupdate pemberitaan perkembangan penanggulangan Covid-19 setiap hari.

c. Level Sosial

Stabilitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19 tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah lebih memilih melakukan penanganan Covid-19 melalui cara seperti PSBB dan PPKM sebagai bagian dari penerapan protokoler kesehatan. Sektor pekerjaan masyarakat Indonesia rata-rata mengandalkan upah harian, sehingga dianggap harus tetap berlangsung meskipun Covid-19 tengah melanda. Melalui cara ini, penanganan Covid-19 tetap berjalan bersamaan dengan peningkatan ekonomi secara nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan penanganan Covid-19 dilakukan melalui kajian dan pertimbangan bersama pemerintah pusat yang kemudian diikuti oleh setiap daerah di Indonesia.

Penerapannya pun telah dimuat dalam undang-undang sehingga aturannya jelas dan bersifat mengikat, serta bagi yang melanggar kebijakan tersebut dapat dipidana. Wabah covid-19 memberikan dampak secara global hingga mengganggu sistem sosial dan ekonomi, kemudian mempengaruhi kesehatan mental masyarakat[31]. Situasi ekonomi Indonesia sendiri mengalami penurunan, seperti dalam laporan Asian World Bank bahwa pada tahun 2019 Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,02%, namun semenjak pandemi melanda tahun 2020 PDB Indonesia turun menjadi 2,5%.

Masalah lain yang ditimbulkan Covid-19 adalah masyarakat mengalami perubahan mendadak dalam kehidupan; ketidakpastian tentang masa depan; kemerosotan mata pencaharian; pembatasan jarak sosial; karantina yang dikenakan; stigmatisasi, diskriminasi dan fragmentasi komunitas; hilangnya orang yang dicintai; dan ancaman tertular Covid-19[32]. Seluruh sektor industri dan pariwisata

[31] Lotzin A. et.al, "Stressors, Coping and Symptoms of Adjustment Disorder in the Course of the Covid19 Pandemic – Study Protocol of the European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Pan-European Study," *European Journal of Psychotraumatology* 11, no. 1 (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1780832.

[32] Javakhishvili et al, "Traumainformed Responses in Addressing Public Mental Health Consequences of the Covid-19 Pandemic: Position Paper of the European Society for Traumatic

mengalami penurunan pendapatan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian tinggi. Kondisi ini dinilai lebih parah dibanding dengan krisis ekonomi sejak tahun 1998.

Dampak pandemi covid -19 bagi kehidupan masyarakat sangatlah besar. Persebaran covid-19 terjadi di seluruh Indonesia dengan Pulau Jawa sebagai wilayah terdampak paling besar. Mobilitas masyarakat di berbagai provinsi juga menjadi terbatas karena pemerintah menerapkan PPKM, blokade jalan oleh aparat keamanan, dan pengurangan jam operasional pasar dan tempat bisnis lainnya. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan ekonomi dan sosialkemasyarakatan pun terhambat.Menurut Kementerian Tenaga Kerja, sekitar 85 persen pekerja dirumahkan karena kantor/perusahaan mereka tidak beroperasi akibat penerapan kebijakan oleh pemerintah.

Mayoritas pekerja tersebut bekerja di dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pariwisata, transportasi, dan manufaktur. Selain itu, kebijakan karantina wilayah/lockdown di negara lain juga ternyata memengaruhi berbagai unit usaha di Indonesia karena berbagai perusahan tersebut kesulitan mengimpor bahan baku produksi dan mengekspor hasil produksi ke berbagai negara lain[33].

Dampak ekonomi kebijakan PPKM tidak berhenti di situ, selanjutnya, SMERU Research Institute (2020) merilis hasil simulasi dampak pandemi covid-19 terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia berbeda dengan proyeksi ideal pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5 persen, kajian tersebut menerangkan bahwa angka itu akan turun dari 4,2 hingga 1 persen karena dampak penyebaran covid19. Jadi, jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya terkoreksi menjadi 4,2 persen, tingkat kemiskinan berada di

Stress Studies (ESTSS)," *European Journal of Psychotraumatology* 11, no. 1 (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1780782.

[33] Kompas, "Dampak Corona, Bisnis Transportasi Merugi Dan Beralih Fungsi. Kompas TV."

kisaran 9,22 persen hingga 9,71 persen. Artinya, jumlah orang miskin Indonesia kemungkinan akan bertambah sebesar 1,3 juta atau total orang miskin menjadi 26,09 juta. Jika ekonomi hanya tumbuh antara 1,2 dan 1 persen, tingkat kemiskinan diperkirakan menanjak antara 12,21 hingga 12,37 persen. Jumlah orang miskin naik sebanyak 8,03 hingga 8,45 juta atau total orang miskin di Indonesia menjadi antara 32,82 dan 33,24 juta.

Selain dampak ekonomi akibat adanya kebijakan PPKM, yang mengalami perubahan yang cukup singnifikan adalah aspek sosial, dimana kondisi masyarakat yang belum siap beradaptasi tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Meskipun, masyarakat pada dasarnya memang akan selalu mengalami perubahan.

Masyarakat tidak bisa dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, melainkan sebagai proses yang senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda. Akan tetapi, dalam konteks kebijakan PPKM, perlu diketahui bahwa apakah perubahan yang terjadi dalam masyarakat bersifat total sehingga menghasilkan sistem sosial baru atau yang terjadi hanyalah proses negosiasi ulang di dalam sistem sosial sehingga akan tercipta titik keseimbangan yang baru.

Harus diakui bahwa dampak pandemi covid-19 apalagi dengan pemberlakuan kebijakan PPKM di Indonesia telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan, bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya.

Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi, kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Tentu ini bukan persoalan yang sederhana. Sebab pandemi Covid-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang.

Kedepan, masyarakat justru akan dihadapkan pada situasi perubahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejumlah tata nilai dan norma lama harus ditata ulang dan direproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru. Melihat situasi dan kondisi yang diatas, dimana pandemi covid-19 tampak telah jauh berkembang dari suatu krisis kesehatan yang perlahan bereskalasi menjadi krisis sosial–ekonomi, maka sangat penting kajian mengenai dampak sosial dan ekonomi penerapan kebijakan PPKM di Indonesia.

Situasi tersebut tidak luput dari kajian kebijakan publik karena menyangkut suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan seperti menurut Thomas R. Dye menjelaskan bahwasanya Kebijakan publik sebagai sebagai segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan[34]. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda[35].

Selanjutnya Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa: "Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya

[34] Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi* (Jakarta: PT Elek Media Kompotindo, 2003).
[35] Nugroho.

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan ". Dari hal tersebut dapat dimaknai bahwa esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat[36].

Peningkatan infeksi Covid-19 semakin masif hingga tahun 2021, maka secara bertahap pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan khusus. Jumlah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk tahun 2021 telah ditambah sehingga mencapai Rp 619 triliun. Implementasi wacana penanganan Covid-19 tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Hal ini dianggap penting untuk menjaga citra pemerintah dan kepercayaan oleh masyarakat. Konsep ini sejalan dengan pendapat Tenriawali bahwa strategi wacana dalam penanganan Covid-19 menggunakan strategi nominalisasi dan kategorisasi dengan skala prioritas tertentu demi memulihkan keadaan[37].

Oleh karena itu, kontrol dan pusat informasi dilakukan secara eksklusif. Pemerintah daerah tidak dapat menerapkan kebijakan khusus sebelum melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki power dan sebagai pemegang kontrol negara sehingga perlu mempertahankan citra politiknya di hadapan masyarakat. Wacana dalam penanganan Covid-19 menunjukkan legalitas pemerintah pusat yakni presiden.

Wacana tersebut terus bergulir, sehingga dinilai memiliki tendensi politik. Selaras dengan pendapat Susanto dan Wati yang menyatakan bahwa sebuah wacana dapat mengandung upaya

---

[36] Leo. Agustinus, "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid 19 : Pengalaman Indonesia.," *Jurnal Borneo Administrator*, 16, no. 1 (2019).

[37] Tenriawali A. Y., "Representasi Korban Kekerasan Dalam Teks Berita Daring Tribun Timur: Analisis Wacana Kritis.," *Jurnal Totobuang* 6, no. 1 (2018): 1–15.

politis dan ideologis untuk menunjukkan hegemoni dan dominasi sebagai alat kontrol sosial[38]. Pendapat ini sejalan dengan Corsi et al. bahwa covid-19 memiliki dampak kematian dan bidang ekonomi serta politik[39]. Desakan terhadap presiden untuk melakukan lockdown yang diserukan oleh politisi menimbulkan polemik. Sementara presiden memiliki pertimbangan khusus yang dinilai menjaga legacy ekonomi. Kalau ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah pandemi covid-19, maka citra politiknya akan tetap bertahan sampai era pemerintahnya berakhir. Oleh karena itu, penciptaan teks wacana ini membuktinya adanya dimensi politik di tengah penanganan pandemi covid-19.

Data tersebut menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah penuh pertimbangan-pertimbangan politik. Hal ini dianggap penting untuk menjaga citra dirinya sebagai pemimpin. Kebijakan tersebut menjadi pilihan politik pemimpin pada umumnya. Namun, tidak semuanya tindakan politis bersifat negatif selama mengedepankan proses demokrasi dan keselamatan rakyat. Apalagi konstitusi negara ini dibangun oleh tindakan-tindakan politik jadi dinamika politik akan selalu ada pada semua sektor kebijakan pemerintah. Hal inilah yang membuat filsuf Italia Cicero mengatakan bahwa "*keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi suatu negara*." Oleh karena itu, sikap dan tindakan pemerintah perlu mengedepankan keselamatan rakyat sebagai pemilik konstitusi sebenarnya.

[38] Susanto D. & Wati R., "Wacana Romantisme Dalam Sejarah Sastra Indonesia Periode Kolonial Belanda (1900-1942)," *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya (Ejournal)* 5, no. 1 (2019): 40–52.

[39] Corsi M. et al, "A Feminist Reading of Italy's North–South Dualism in the Wake of Covid-19. Feminist Economics" 27, no. 1–2 (2021): 203–16, https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13545701.2021.1876904.

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis simpulkan bahwa analisis wacana kritis menekankan wacana sebagai bentuk interaksi dan melalui analisis wacana kritis tampak pemakaian bahasa tutur dan tulisan sebagai wujud praktik sosial. Praktik sosial dalam analisis wacana kritis berkaitan dengan peristiwa dari sebuah realitas dan struktur sosial. Peran media tidak lepas dari praktik ideologi, artinya media dengan variatif menyajikan suatu pemberitaan dengan menggunakan kontruksi tertentu untuk menarik minat pembaca. Media covid19.go.id menjelaskan berbagai macam realitas yang muncul dengan karakter pemilihan judul dan wacana.

Beberapa berita diproduksi dengan alasan dan ideologi tertentu untuk membentuk kesadaran palsu yang dibuat oleh media. Kemudian tanpa sadar masyarakat menjadi terbiasa dengan fakta-fakta itu. Hal-hal yang menjadi penentu sebuah pemberitaan adalah faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya. Fairclough berpendapat bahwa realitas sosial yang dibangun membuat berita itu tecermin dalam pilihan-pilihan kata yang dibentuk dalam penyusunan berita.

Bila dilihat dari teori analisis Fairclough, komunikasi pemerintah dalam pengendalian Covid-19 menjadi objek utama pemberitaan. Media menitikberatkan keputusan Pemerintah untuk menetapkan kebijkan terkait PSBB, PPKM, penggunaan masker dan cuci tangan dengan sabun, kebijakan PCR serta vaksinasi ditengah situasi Pandemi Covid-19. Situs covid19.go.id menitikberatkan pada sisi positif kebijakan yang diambil serta menunjukan bahwa pemerintah merupakan pihak yang memiliki kekuasaan penuh atas semua kebijakan.

Dari hasil analisis didapatlah pemetaan komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan selama masa pandemi Covid-19 berusaha menunjukan citra yang baik. Pemilihan kata yang digunakan dalam komunikasi pemerintah berusaha mengklarifikasi fakta-fakta yang

telah beredar di masyarakat sehingga menciptakan evaluasi positif dari kebijakan pengendalian Covid-19.

B. Implikasi Penelitian

Peneliti menemukan sebuah analisis wacana kritis Nourman Fairclough yang menenkankan pada bahasa tutur dan tulisan sebagai wujud praktik sosial. Analisis dilakukan hanya pada beberapa judul berita dalam www.covid19.go.id. Dengan analisis judul berita ditemukan beberapa kesimpulan gaya diksi yang mengarahkan pembaca pada opini yang digiring oleh penyampai pesan berita. Semoga pada penelitian mendatang, yang membahas terkait analisis Nourman Fairclough dapat mengulik lebih dalam lagi, agar didapatkan pemahaman yang lebih dari analisis itu sendiri.

C. Keterbatasan Penelitian

Model analisis wacana kritis Norman Fairclough menganalisis wacana dalam tiga dimensi yaitu teks, *discourse practice*, dan *sociocultural* practice. Dalam analisis *discourse practice* penulis tidak menggunakan metode wawancara karena penulis mengalami kesulitan dalam komunikasi dengan tim gugus percepatan penanganan Covid-19 sebagai pemilik website www.covid19.go.id.

D. Saran

Diharapkan media memiliki independensi sehingga media dapat bersifat obyektif dalam menghadirkan sebuah fakta dan narasumber. Masyarakat dalam hal ini mendapatkan berita yang melihat dari dua sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus, Leo. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid 19 : Pengalaman Indonesia." *Jurnal Borneo Administrator,* 16, no. 1 (2019).

Ahmad Fhatoni. "Dampak Covid 19 Dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM Di Wiyung Surabaya. Oleh Ahmad Fhatoni. Jurnal Prodi Ekonomi Syariah" 3, no. 2 (2020).

Ahmad Mahadi. "Praktik Hegemoni Dalam Novel Orang-Orang Proyek Karya Ahmad Tohari (Kajian Hegemoni Gramsci)." *BAPALA* 7, no. 1 (2020).

Anshori dan Ghafur. *Hukum Islam; Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Arie Purnomo. "Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Organisasi Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Noken* 3, no. 2 (2018): 11–26.

Badan Pusat Statistik. "Survei Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19," 2021. https://covid-19.bps.go.id/.

Baran S.J. *Pengantar Komunikasi Massa: Literasi Media Dan Budaya*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

BBC News. "Covid-19: Jelang Pemberlakuan Kembali PSBB , Kasus Harian Di Jakarta Mencapai 1.274." 2021. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52922566.

Berty T. T. S. "Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia Jadi Sorotan Dunia.," 2020.

Cangara H. *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi,*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Coombs. *Parameters for Crisis Communication. In W.T. Coombs & S.J. Holladay (Eds.), The Handbook of Crisis Communication "Edisi Terjemahan."* West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010.

Corsi M. et al. "A Feminist Reading of Italy's North–South Dualism in the Wake of Covid-19. Feminist Economics" 27, no. 1–2 (2021): 203–16. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13545701.2021.1876904.

Creswell W. John. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

D., Nurita. "Kebijakan PPKM Level 3 Batal Diterapkan." 2021. https://nasional.tempo.co/read/1537104/kebijakan-ppkm-level-3-batal-diterapkan-pemerintah-dinilai-labil.

Darma. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya, 2013.

Deddy Mulyana. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Dhama K. "COVID-19 Vaccine Hesitancy - Reasons and Solutions to Achieve a Successful Global Vaccination Campaign to Tackle the Ongoing Pandemi. Human Vaccines & Immunotherapeutics" 12, no. 10 (2021). https://doi.org/495–3499. https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1926183.

Diah Handayani et al. "Corona Virus Disease 2019." *Jurnal Respirologi Indonesia* 40, no. 2 (2020): 119–29.

Djalante R. et al. "Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020." *Elsevier: Progress in Disaster Science* 6 (2020): 1–9. https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091 2.

Effendi. *Kepemimpinan Dan Komunikasi*. Jogjakarta: Al-Amin Press, 2014.

Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Jogjakarta: LKiS Group, 2012.

———. "Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media (N. Huda (Ed.); VII)." *LKiS*, n.d.

Erliana Hasan. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

F, Sulistyowati. "Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan COVID-19 Pada Majalah TEMPO Edisi Maret-Juli 2020." *Urnal Riset Komunikasi* 4, no. 2 (2021): 198–214.

Fakhururoji M. et al. "Strategi Komunikasi Publik Penanganan COVID-19 Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Komunikasi Pemerintah Dan Agama." *LP2M Sunan Gunung Djati.*, 2020.

Fillaili & Ana Rosidha Tamyis. "'Menjaga Persepsi Risiko Masyarakat Melalui Komunikasi Risiko Yang Efektif Pada Masa Pandemi COVID-19''." *Catatan Kebijakan [Daring]*, 2020.

Gondokusumo A.A. *Komunikasi Penugasan*. Jakarta: Gunung Agung, 1980.

Gutama T.A. "Peran Komunikasi Dalam Organisasi." *Jurnal Sosiologi Dilema* 25, no. 2 (2010): 107–13.

Handoko, Putra &. "Komunikasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah: Kasus Dinamika Pelaksanaan Local Lockdown Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19." *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 1–15.

Hyland-Wood et.al. "Toward Effective Government Communication Strategies in the Era of COVID-19." *Humanities and Social Sciences Communication* 8, no.

30 (2021). https://doi.org/DOI: 10.1057/s41599-020-00701-w.

Ilaihi. *Komunikasi Dakwah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Iskak I. et al. "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al – Ikhlas, Jakarta Barat." *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat* 1, no. 3 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.32493/jpdm.v1i3.11431.

Javakhishvili et al. "Traumainformed Responses in Addressing Public Mental Health Consequences of the Covid-19 Pandemic: Position Paper of the European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)." *European Journal of Psychotraumatology* 11, no. 1 (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1780782.

JPNN. "Gubernur Anies Baru Berkoordinasi Dengan Satgas COVID-19 Setelah Umumkan Rencana PSBB," 2020. https://www.jpnn.com/news/oalah-gubernur-anies-baru-berkoordinasi-dengan-satgas-covid-19-setelah-umumkan-rencana-psbb.

Jupriono D. et al. "Komunikasi Politik Jokowi: Analisis Wacana Kritis." *In Prosiding Seminar Nasional Bahasa & Sastra* 8 (2016): 44–50.

Kemenkes. "Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (n.D.)," 2020.

Kemenkes R. I. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *Kementerian Kesehatan RI* 28 (2020): 157–63.

Kompas. "Dampak Corona, Bisnis Transportasi Merugi Dan Beralih Fungsi. Kompas TV.," 2020.

Kouzes J. M & Posner B. Z. *Leadership the Challenge. Alih Bahasa: Reviyani Sjahrial*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Kriyantono. *Public Relations & Crisis Management (Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis &Kualitatif)*. Jakarta: Kencana, 2015.

Lambert dan Loiselle (2007) dalam Stephens Keri. *New Media in Times of Crisis*. Routledge, New York, 2019.

Lotzin A. et.al. "Stressors, Coping and Symptoms of Adjustment Disorder in the Course of the Covid19 Pandemic – Study Protocol of the European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Pan-European Study." *European Journal of Psychotraumatology* 11, no. 1 (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1780832.

M, Ganiem LM & Budyatna. *Teori Komunikasi Antar Pribadi*. Jakarta: Kencana, 2011.

Maghvira G. "Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Tempo.Co Tentang

Kematian Taruna STIP Jakarta." *Jurnal The Messenger* 9, no. 2 (2017): 120–30.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19," 2020.

McArthur J. A. & Conway K. B. "Exploring the Relationship between Studentinstructor Interaction on Twitter and Student Perceptions of Teacher Behaviors." *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 2012.

Miles M. B. et al. *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.

Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Mona N. "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2, no. 2 (2020).

Muhamad Arni. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.

Muhammad Idris. "Ironi Harga Tes PCR: Dulu Bayar Rp 2,5 Juta, Kini Cuma Rp 275 Ribu," 2021.

Muhammad Mufid. *Etika Dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Naqqiyah, M. S. & Retpitasari. "Analisis Wacana Kritis Vidio Penanggulangan Covid-19 Pemerintah Jawa Timur Di Facebook." *Connected: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2020, 10–17.

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2021.

Noor M.U. "Penilaian Kualitas Informasi Sebagai Bentuk Sikap Tabayyun Ketika Menerima Informasi Di Sosial Media Dan Internet." *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi* 2, no. 1 (2018).

Novrizaldi. "Perketat Libur Nataru, Pemerintah Akan Terapkan Kebijakan PPKM Level 3 Di Seluruh Indonesia. Kemenko PKM." 2021.

Nugraheny D.E. "PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri Dan SE." 2021.

Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo, 2003.

Nurani. "Pengaruh Komunikasi Internal Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan KErja Karyawan Bagian Pulp Machine Pada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang Riau." *Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*

Pekanbaru, 2014.

Nurwati, Rahma Ainun Mardiyah dan R Nunung. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran Di Indonesia." *Universitas Padjadjaran*, 2020, 19.

Ontario Hospital Association. "Effective Communication Strategies for COVID-19." *Research Brief [Daring]*, 2021.

Retpitasari, Naqqiyah M.S. &. "Analisis Wacana Kritis Vidio Penanggulangan Covid-19 Pemerintah Jawa Timur Di Facebook." *Connected: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2020): 10–17.

Riadi., Erfan. "'Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)'" 6 (2010).

Romli K. *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta: Grasindo, 2011.

Samuel, Malone. *Mind Skill For Managers*. England: Jower Publishing Limited, 1997.

Sanders, K., & Canel, M. J. "Mind the Gap: Local Government Communication Strategies and Spanish Citizens' Perceptions of Their Cities." *Public Relations Review* 41, no. 5 (2015): 777–84.

Santoso. *Bahasa, Masyarakat Dan Kuasa: Topik-Topik Kritis Dalam Kajian Ilmu Bahasa*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2006.

Sasa Djuarsa Sendjaja. *Teori-Teori Komunikasi, Cetakan Ke-1*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1994.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 RI. "Data Sebaran Covid-19," 2021. https://covid19.go.id/.

Setyawati N. "Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19." *Jurnal Education And Development* 8, no. 2 (2020): 135–135.

Shereen M. A. et al. "OVID-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses." *Journal of Advanced Research* 24 (2020): 91–98.

Sibuea, Harris Y. P. *Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Dan Bali*. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*. (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2021.

Sijabat H. et al. "PCR Test Juridical Review for Prospective Domestic Airplane Passengers." *Legar Brieff* 11, no. 2 (2022): 904–914.

Siswanto A. & Febriana P. "Representasi Indonesia Dalam Stand Up Comedy (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Dalam Pertunjukan Spesial Pandji Pragiwaksono Mesakke Bangsaku)." *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2018): 121–30.

https://doi.org/https://doi.org/10.21070/kanal.v5i2.1508.

Siti Maryam. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *IPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM* 6 (2017).

Spieker H. *The Right to Give and Receive Humanitarian Assistance. In International Law and Humanitarian Assistance*. Edited by Springer. Berlin, 2011.

Sulistyowati F. "Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan COVID-19 Pada Majalah TEMPO Edisi Maret-Juli 2020." *Urnal Riset Komunikasi* 4, no. 2 (2021): 198–214.

Surahmat A. Dida S. & Zubair F. "Analysis of the Government's Crisis Communication Strategy Discourse to Defend Covid-19." *Jurnal Komunikasi* 13, no. 1 (2021): 36–53.

Suratun. *Klien Gangguan Sistem Muskuloskeletal*. Jakarta: EGC, 2008.

Susanto A.S. *Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek I*. Jakarta: Bina Cipta, 2010.

Susanto D. & Wati R. "Wacana Romantisme Dalam Sejarah Sastra Indonesia Periode Kolonial Belanda (1900-1942)." *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya (Ejournal)* 5, no. 1 (2019): 40–52.

Tenriawali A. Y. "Representasi Korban Kekerasan Dalam Teks Berita Daring Tribun Timur: Analisis Wacana Kritis." *Jurnal Totobuang* 6, no. 1 (2018): 1–15.

Wati N. M. N. et al. "Optimalisasi Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Pada Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Penularan Virus COVID-19." *Jurnalempathy.Com* 1, no. 1 (2020): 1–8. https://doi.org/doi: 10.37341/jurnalempathy.v1i1.1.

Wibowo Hadiwardoyo. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat PSBB." *Jurnal of Business and Entrepreneurship 2* 2 (2020): 90.

Widiatmoko W. "Analisis Kohesi Dan Koherensi Wacana Berita Rubrik Nasional Di Majalah Online Detik." *Jurnal Sastra Indonesia* 4, no. 1 (2015): 1–12. https://doi.org/https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsi/article/view/7359.

Williams V. C. "Assuming Identities, Enhancing Understanding: Applying Active Learning Principles to Research Projects." *Journal of Political Science Education* 2, no. 2 (2006): 171–86.

Wursanto. *Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi*. Jogjakarta: CV. Andi Offset, 2005.

Yusuf Zainal Abidin. *Komunikasi Pemerintahan : Filosofi, Konsep Dan Aplikasi,*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.